

Rumusan Hasil
Kongres Kebudayaan Desa
1 Juni-15 Agustus 2020



KELUARGA

Peran Strategis Keluarga
dalam Pemuliaan Martabat Manusia

KELUARGA

Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia

Webinar Seri 16

Kongres Kebudayaan Desa 2020

1-10 Juli 2020



KELUARGA

Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia

© Sanggar Inovasi Desa 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020

Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93, Panggunharjo,
Yogyakarta.

Web: www.sanggarinovasidesa.id

| | |
|-----------------------------|---|
| Penanggung jawab | : Faiz Ahsoul |
| Penyunting | : Yona Primadesi |
| Penyelia aksara | : Dyah Permatasari |
| Tata letak isi | : Rio Ap |
| Desain dan ilustrasi sampul | : Ketjilbergerak, Arif Gunawan, Agus Teriyana |

Cetakan pertama, Agustus 2020

Kongres Kebudayaan Desa

xxxii, 108 hal., 13x19 cm.

ISBN :

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.



Pengantar Editor

Yona Primadesi

Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai institusi sosial terkecil yang sekaligus menjadi sistem sosial dan mutlak ada di setiap kebudayaan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, keluarga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami, istri, dan anak-anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya.¹

Sebagai bentuk lingkungan sosial yang pertama, keluarga berperan dalam memperkenalkan cinta kasih, moral, keagamaan,

¹ Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

sosial budaya, dan nilai-nilai bersama yang diyakini dalam masyarakat. Keluarga juga menjadi pertahanan utama yang dapat menangkal berbagai pengaruh negatif dari dinamika sosial yang ada. Karena tahap awal pemasyarakatan (*socialization*) dengan segala interaksinya dimulai dari lingkungan keluarga.

Berawal dari lingkungan keluarga, individu berkembang. Keluarga yang sehat dan sejahtera akan lebih mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga untuk mendorong kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan. Sehingga kehidupan di lingkungan keluarga berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keluarga dianggap sebagai penentu baik dan buruknya suatu bangsa.

Akan tetapi, kehidupan keluarga selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan dan fenomena yang berkembang seiring dengan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi oleh hampir seluruh keluarga di Indonesia saat ini adalah pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 yang pada tanggal 30 Januari 2020 diumumkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat berdampak di seluruh aspek kehidupan. Keluarga menjadi unit terkecil dalam masyarakat yang terdampak paling besar, baik risiko kesehatan, ekonomi, hingga kesejahteraan keluarga. Keutuhan sebuah keluarga dipertaruhkan di masa pandemi, misal dikarenakan kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus perceraian, hingga kasus kehamilan yang tidak direncanakan.² Di samping itu, relasi kuasa ini semakin tegas di

2 WHO Report, April 2020 dari www.who.int



saat keterbatasan ruang gerak masing-masing anggota keluarga, penyempitan ruang privasi—yang dinilai mampu memunculkan konflik—terjadi di dalam keluarga. Ketidakmampuan setiap anggota keluarga untuk beradaptasi akan mendatangkan konflik-konflik baru. Perempuan dan anak menjadi pihak yang paling rentan mendapatkan kekerasan dalam lingkungan keluarga.

Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan jika keluarga berada dalam situasi yang rentan. Agar keluarga kuat menghadapi krisis, sangat dibutuhkan peran penuh suami-istri, termasuk anak-anak untuk saling mendukung, menghargai satu sama lain, serta berbagi peran domestik saat berada di rumah. Kemampuan dan ketahanan keluarga untuk menghadapi masa krisis sangat menentukan keberlangsungannya di masa yang akan datang.

Di samping itu, masa pandemi Covid-19 juga memberi kesempatan bagi setiap keluarga untuk merefleksikan ulang nilai-nilai kehidupan yang lebih terbuka dan kembali kepada nilai-nilai dasar Nusantara: gotong royong dan kekeluargaan. Covid-19 bisa menjadi ruang untuk menanamkan kembali tatanan kehidupan baru yang lebih manusiawi, lebih memanusiakan, lebih jujur, lebih adil dan menyelamatkan seluruh tatanan keluarga dan masyarakat.

Berangkat dari fenomena tersebut, Webinar Seri 16 dalam rangkaian Kongres Kebudayaan Desa 2020 ini mencoba mendiskusikan apa dan bagaimana makna, peran, dan tatanan baru berkeluarga dalam sebuah tema besar “Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru”.



Tema ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan dan memberikan gambaran pola penguatan dan pembangunan ketahanan keluarga di era Covid dan sesudahnya, meliputi:

1. Pemaknaan ulang arti keluarga yang selama ini tergerus arus informasi dan modernisasi.
2. Langkah dalam membangun ketahanan keluarga di era dan pasca-Covid yang memungkinkan terwujudnya *family homeostasis*.
3. Pengetahuan yang harus dimiliki oleh keluarga (suami, istri, anak) untuk menguatkan fondasi dan ketahanan keluarga serta langkah strategis bagi suami-istri dalam membangun kesadaran dalam menghadapi pandemi.
4. Model perilaku yang bisa dikembangkan dalam keluarga agar keluarga tetap berfungsi secara utuh.
5. Strategi untuk mendorong pendidikan karakter yang lebih jujur, terbuka, dan manusiawi guna menjadi tatanan hidup baru pada masa dan pascapandemi Covid-19.
6. Kebijakan strategis bagi pemerintah desa dalam membangun keberfungsian dan ketahanan keluarga.
7. Program-program yang bisa ditawarkan untuk pemerintah desa dalam membangun ketahanan keluarga.
8. Model edukasi keluarga yang siap diimplementasikan di tingkat desa.

Webinar yang diselenggarakan di hari kesembilan, Kamis, 9 Juli 2020, mulai pukul 13.00 hingga pukul 16.00 WIB, bertempat



di Kampoeng Mataraman, Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ini menghadirkan empat narasumber, yaitu (1) Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG., selaku kepala BKKBN; (2) Alissa Wahid; (3) Prof. Tina Afiatin, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada; dan (4) Najeela Shihab, pendiri Sekolah Cikal; dengan moderator Farha Ciciek dari Tanoker.

Seri webinar kali ini berupaya mendorong narasumber untuk sumbang gagasan dan pengalaman, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Namun, dikarenakan berbagai hambatan, sebagian dari narasumber hanya bisa memaparkan ide dan pengalaman mereka dalam bentuk lisan, yang kemudian dijalin menjadi sebuah kesatuan tulisan utuh oleh tim Kongres Kebudayaan Desa 2020.

Buku ini merupakan luaran dari kegiatan Webinar Seri 16 Kongres Kebudayaan Desa 2020, baik yang ditulis langsung oleh narasumber, tulisan yang merupakan catatan dari tim kongres, maupun beberapa tulisan yang lolos kurasi *Call for Papers*. Semoga tulisan dari Webinar Seri 16 yang telah berbentuk buku dan berada di tangan pembaca ini mampu menyumbang ide, gagasan, untuk arah Indonesia baru selama dan setelah berakhir Covid-19 yang berpijak dari nilai luhur masyarakat desa. Akhir kata, selamat membaca!

Kampoeng Mataraman, Juli 2020





Sekapur Sirih

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: “Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata”. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-desa di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No.

13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era “normal baru” daripada aspek kebudayaan.

“*New normal*” adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkatkan statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. “*New normal*” adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing*, berefek kejut untuk merefeksi dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati. Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.



Di situlah kini desa berada, yang berimbas pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbaru dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Compte, Disanayake, maupun Alvin Tofler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie*, membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.

Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah



dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaring pengaman sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Sebaliknya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan “normal baru” atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual trust* untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan. Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus



mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam*.

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

Hamengku Buwono X
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





Sekapur Sirih

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam keabajikan.

Melawan korupsi dari desa.

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraktikkan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkir Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian menular.



Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspiator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.



Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Giri Suprardiono

Direktur Dikyanmas KPK





Sekapur Sirih

Menteri Desa, PDTT

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa

jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau *hopolis kuntul baris*, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain,



di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini *problem solving* yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. *Tagline* “Desa untuk Semua Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan



kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggunharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.

Jakarta, 5 Agustus 2020

Abdul Halim Iskandar

Menteri Desa, PDTT





Pidato Kebudayaan

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud

*A*ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan

cara hidup, cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

Pertama, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing, lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

Kedua, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang

membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti



ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegakkan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah,

tradisi lisan, dan berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun



2023 kelak, nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik. Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retoris, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang.

Mengubah cara pandang dan kebiasaan memerlukan perubahan mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut *science* mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan,



sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam.

Jakarta, 1 Juli, 2020

Dr. Hilmar Farid

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





Daftar Isi

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Pengantar Editor..... | v |
| Sekapur Sirih | |
| 1. Gubernur DIY | x |
| Hamengku Buwono X | |
| 2. Direktur Dikyanmas KPK..... | xv |
| Giri Suprpdiono | |
| 3. Menteri Desa, PDTT | xix |
| Abdul Halim Iskandar | |

| | |
|--|--------------|
| Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud | xxiii |
| Dr. Hilmar Farid | |
| Daftar Isi | xxxi |
| Pengelolaan Mutu Keluarga di Era Digital: Strategi Menghadapi Pandemi Covid-19 Berbasis Ketahanan Psikologis Keluarga | 1 |
| Tina Afiatin | |
| Inspirasi dari Desa untuk Indonesia Baru..... | 20 |
| Hasto Wardoyo | |
| Membangun Ketangguhan Keluarga dari Desa..... | 29 |
| Alissa Wahid | |
| Keluarga dan Pendidikan di Era <i>New Normality</i> | 40 |
| Najeela Shihab | |
| Ketahanan dan Konseling Keluarga <i>Wonderful Family</i> ... | 50 |
| Fathayatul Husna | |
| Pengasuhan Gotong Royong ala Ledokombo Belajar dari Kearifan Keluarga Desa | 64 |
| Farha Ciciek, dkk. | |
| Epilog | 74 |
| Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa 2020 | |
| Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa..... | 102 |
| Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020..... | 105 |





Pengelolaan Mutu Keluarga di Era Digital: Strategi Menghadapi Pandemi Covid-19 Berbasis Ketahanan Psikologis Keluarga¹

Tina Afiatin²

Ketahanan keluarga merupakan cikal bakal ketahanan nasional untuk mengatasi berbagai tantangan dan problem yang dihadapi oleh bangsa. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta

- 1 Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 10 Juli 2020, Seri 16: Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru.
- 2 Prof. Dr. Tina Afiatin, M. Si. merupakan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Bukunya berjudul *Psikologi Perkawinan dan Keluarga: Penguatan Perkawinan dan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal* (2018).

mengandung kemampuan fisik materiel guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmoni dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin (UU No. 52/2009). Keluarga yang sehat dan sejahtera merupakan lahan yang subur untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh anggota keluarga sehingga memungkinkan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Namun, seiring dengan berbagai perubahan lingkungan fisik dan sosial serta kemajuan teknologi maka banyak tantangan yang harus dihadapi keluarga untuk dapat mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Salah satu tantangan berat yang harus dihadapi oleh keluarga saat ini adalah pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease-19*). Semula kasus Covid-19—oleh Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019—disebutkan sebagai kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 2020, Covid-19 ditetapkan sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Untuk mengatasi pandemi Covid-19 maka keluarga di era digital dituntut untuk mau dan mampu mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada agar dapat mewujudkan kesejahteraan.

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dampak Covid-19 tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga ekonomi, dan mengubah berbagai

tatanan kehidupan sosial manusia. Jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sampai 1 Juli 2020 dilaporkan sebanyak 57.770 orang dan jumlah pasien meninggal 2.934 orang.³ Pandemi Covid-19 telah menjadi krisis di negeri ini dan di berbagai belahan dunia. Situasi krisis ini dapat membuat stres orang yang mengalaminya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi pandemi Covid-19. Pemerintah melalui kementerian terkait (Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Majelis Ulama Indonesia telah menerbitkan panduan pelaksanaan program pencegahan persebaran Covid-19⁴. Sementara itu, untuk menangani secara medis dan kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga telah menerbitkan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Covid-19⁵. Selain itu, untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan psikologi klinis, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia juga telah menerbitkan Panduan Layanan Psikologi Klinis dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Layanan psikologi diberikan dalam upaya pencegahan persebaran dan penanggulangan dampak psikologis pandemi Covid-19, misalnya melalui *psikoedukasi* dan konseling serta pendampingan psikologis bagi pasien yang terkonfirmasi Covid-19.

Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan penanggulangan dampaknya memerlukan partisipasi aktif dan kerja sama seluruh

3 Kompas.com, 1 Juli 2020.

4 Majelis Ulama Indonesia. 2020. *Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19*.

5 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. 2020. *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia*.



elemen negara, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat secara menyeluruh dalam tingkatan usia (kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia) perlu didorong untuk melaksanakan praktik pencegahan persebaran Covid-19 melalui pelaksanaan protokol kesehatan, yaitu memakai masker dengan benar, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta tidak berkerumun dengan cara menjaga jarak fisik dengan orang lain minimal 1 meter. Selain itu untuk menjaga imunitas tubuh agar tidak mudah terpapar Covid-19, masyarakat harus melaksanakan pola hidup sehat, yaitu makan makanan bergizi, tidur cukup (7-8 jam per hari), minum air putih (8 gelas atau setara dengan 1 liter per hari), tidak merokok, rutin berolah raga, serta tidak stres. Praktik perilaku pencegahan persebaran Covid-19 ini bagi sebagian besar masyarakat masih memerlukan adaptasi, sehingga perlu diupayakan berbagai intervensi, terutama dilakukan oleh institusi keluarga. Hal ini mengingat bahwa pada hakikatnya, keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan individu.

Memaknai Ulang Arti dan Fungsi Keluarga di Era Digital

Pengertian keluarga dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Menurut Fitzpatrick (Afiatin, 2018) keluarga dapat diartikan secara struktural, fungsional, dan transaksional. Pengertian keluarga secara struktural sebagaimana dalam rumusan pengertian keluarga menurut UU Nomor 52 Tahun 2009, yaitu: “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri suami istri, atau suami, istri dan

anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.” Pengertian keluarga ditentukan oleh siapa saja yang menjadi bagian dari sebuah keluarga.

Pengertian keluarga secara fungsional didefinisikan dengan terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi psikososial yang mencakup fungsi perawatan, sosialisasi pada anak, ikatan historis, cita-cita, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Bern (2004), keluarga berfungsi untuk reproduksi, sosialisasi atau edukasi, penugasan peran sosial, dukungan ekonomi, dan dukungan emosi.⁶

Pengertian keluarga secara transaksional didefinisikan dengan bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Keluarga merupakan kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan identitas keluarga dan ikatan emosi, pengalaman historis dan cita-cita ke depan.

Menurut Afiatin (2018) keluarga bermakna tidak saja sebagai kumpulan manusia, tetapi juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik secara struktur komposisi dan fungsi, sehingga memunculkan berbagai keunikan dan bersifat dinamis. Pemaknaan dan fungsi keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan sosial dan teknologi.⁷ Menurut Howe (2012), keluarga di abad 21 ini dicirikan dengan interaksi dengan berbagai manusia lintas budaya sepanjang rentang kehidupannya. Keluarga di era digital dengan mudah dan cepat terkoneksi dengan komunitas

6 Berns, R. M. (2010). *Child, Family, School, Community: Socialization and Support (6th Ed.)*. Belmont, CA: Wadsworth.

7 Afiatin, T. 2018. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga. Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Kanisius. ISBN 978-979-21-5546-4.



dan budaya lain seiring dengan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi.⁸

Perkembangan teknologi informasi dan internet yang sangat pesat di era digital telah mengubah tatanan dunia. Internet menciptakan ruang publik dan menghapus kendala komunikasi karena jarak dan waktu, sehingga dunia seolah-olah menyatu yang oleh McLuhan (Berns, 2010) disebut sebagai *global village*. Dalam *global village* manusia di dunia ini seakan menyatu dalam ruang dan waktu yang sama karena adanya kemudahan dan kecepatan komunikasi.

Akan tetapi, kemudahan dan kecepatan komunikasi ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi dapat memberikan keuntungan intensitas dan kecepatan dalam penyampaian pesan, tetapi di sisi lain meningkatkan kompleksitas interaksi, termasuk interaksi antaranggota keluarga dan interaksi antara anggota keluarga dengan orang lain. Komunikasi melalui daring (*online digital*) memang dapat memperkuat interaksi keluarga, tetapi juga dapat menjadi sumber koneksi yang berbahaya dengan orang asing.

Menurut McDaniel dan Radesky (2017), media digital dan internet dapat memberikan berbagai keuntungan, seperti meningkatkan dukungan sosial dan kemudahan melakukan pekerjaan dari rumah, tetapi juga berpotensi sebagai pengganggu dalam dinamika sosial antarindividu yang digambarkan sebagai “*absent presence*” (hadir, tetapi tiada), yaitu situasi ketika individu hadir secara fisik, tetapi pikiran dan perhatiannya terpusat pada

8 Howe, T. R. 2012. *Marriages & Families in The 21St Century. A Bioecological Approach*. West Sussex, UK: John Wiley & Sons.

komunikasi atau isi dari telepon selulernya. Selain itu juga muncul norma sosial baru yang mengizinkan serbuan dari peralatan digital ke dalam area personal. Kondisi ini memunculkan suatu konsep *technoferece*, yaitu gangguan interupsi berbasis teknologi.

McDaniel dan Coyney (2016) mendefinisikan *technoferece* sebagai gangguan dalam interaksi interpersonal atau waktu kebersamaan yang muncul dari peralatan digital atau teknologi. Berbagai interupsi dapat muncul selama percakapan sedang terjadi, kegiatan rutin waktu makan atau bermain, atau adanya pengganggu ketika orang yang sedang berinteraksi dengan kita juga melakukan interaksi dengan teknologi digital. *Technoferece* terjadi akibat dari kebiasaan menggunakan produk digital secara berlebihan.⁹

Hasil penelitian McDaniel melibatkan 170 keluarga dengan usia rata-rata anak 3,04 tahun, menunjukkan bahwa ayah dan ibu yang bermasalah dalam penggunaan teknologi cenderung mengalami *technoferece* dalam interaksi ibu-anak dan ayah-anak. Selanjutnya, problem *technoferece* ibu berkaitan dengan problem perilaku eksternalisasi dan internalisasi anak. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa gangguan teknologi berhubungan dengan problem perilaku anak.

Keluarga memiliki peran utama dalam mengikis perilaku *technoferece*. Era digital dengan segala fasilitas kemudahan dan kecepatan akses, jika tidak disikapi secara bijaksana, akan sangat

9 McDaniel, B.T., & Coyne, S. M. (2016a). Technoferece: The Interference of Technology in Couple Relationship and Implications for Women's Personal and Relational Well-being. *Psychology of Popular Media Culture*. (5): 85-98. Doi: 10.1037/ppm0000065. McDaniel, B. T., & Coyney, S. M. (2016b). The Interference of Tecnology in the Coparenting of Young Children: Implication for Mother's Perception of Coparenting. *The Social Science Journal*. (53): 435-443. Doi: 10.1016/j.soscij.2016.04.010.



berbahaya bagi generasi *digital native*, yaitu generasi yang lahir setelah tahun 1990-an yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak mereka lahir (Afiatin, 2018). Generasi *digital native* ini menjalani kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam perangkat digital, seperti komputer, *video game*, *digital music player*, *video call*, dan sebagainya. Aktivitas apa pun dilakukan dengan mengandalkan gawai (gadget). Penggunaan gawai yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak yang merugikan, di antaranya hubungan keluarga menjadi renggang karena waktu yang digunakan untuk berkumpul bersama keluarga, berkomunikasi dengan tatap muka secara langsung, dan bermusyawarah bersama keluarga, menjadi sangat kurang. Untuk mencegah dampak buruk tersebut, diperlukan model pengasuhan yang cocok dengan perkembangan era digital.

Pola pengasuhan orang tua yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh konteks waktu (Afiatin & Andayani, 2016). Di era digital ini, pengasuhan orang tua yang meliputi aspek dukungan, disiplin/kontrol, dan pengembangan tidak hanya dilakukan dalam dunia nyata (interaksi langsung dengan saling bertatap muka), tetapi juga dalam dunia maya (interaksi melalui media digital dan internet). Salah satu yang dapat dilakukan oleh orang tua sebagai agen sosial terdekat untuk melindungi perkembangan dan kesejahteraan anak dan remaja terkait dengan penggunaan media digital dan internet adalah strategi mediasi orang tua (Vaterlaus, Beckert, Tulane, dan Bird, 2014).¹⁰

10 Vaterlaus, J. M., Beckert, T. E., Tulane, S., & Bird, C. V. 2014. They Always Ask What I'm Doing and Who I'm Talking To: Parental Mediation of Adolescent Interactive Technology Use. *Marriage and Family Review*. 50(8): 691-713.

Mediasi orang tua merupakan istilah yang merujuk pada peraturan (termasuk aturan tentang waktu penggunaan media dan pelarangan konten) dan strategi untuk mendorong penilaian kritis terhadap media teknologi (Linder dan Werner, 2012).¹¹ Mediasi orang tua dalam penggunaan teknologi internet menggambarkan hubungan yang dibangun orang tua dengan anak terhadap penggunaan media dan pola-pola yang digunakan orang tua untuk memberlakukan pembatasan yang mencakup pada strategi percakapan dan strategi interpretatif lainnya sebagai aktivitas pemantauan (Livingstone dan Helsper, 2008).¹² Berdasar uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi orang tua adalah usaha orang tua dalam melakukan teknik dan pola-pola untuk memberlakukan pembatasan (larangan) yang mencakup juga pada strategi percakapan dan strategi interpretatif tertentu sebagai aktivitas pemantauan terhadap aktivitas anak dalam penggunaan teknologi interaktif melalui jaringan internet.

Mediasi orang tua merupakan salah satu bentuk pengasuhan digital. Selain itu, menurut Herlina, Setiawan, dan Jiwana (2018), ada beberapa tindakan yang perlu dilakukan orang tua dalam mengasuh anak dalam berhadapan dengan media digital, yaitu: (1) mendampingi anak mengakses gawai; (2) menyeleksi konten yang sesuai untuk anak; (3) memahami informasi yang disediakan media digital; (4) menganalisis konten digital untuk menemukan pola positif dan negatif; (5) memverifikasi media digital; (6)

11 Linder, J. R., & Werner, N. E. 2012. Relationally Aggressive Media Exposure and Children's Normative Beliefs: Does Parental Mediation Matter?. *Family Relation*. 61(3): 488-500.

12 Livingstone, S., & Helsper, E. J. 2008. Parental Mediation of Children's Internet Use. *Journal of Broadcasting and Electronic Media*. 52(4): 581-599.



mengevaluasi konten media; (7) mendistribusikan konten media; (8) memproduksi konten positif dan produktif bersama; (9) berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan produktif terkait media digital; dan (10) berkolaborasi menciptakan konten digital. Pengasuhan digital ini dalam implementasinya harus disesuaikan dengan fase perkembangan anak.¹³

Berdasar uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kualitas keluarga di era digital ditentukan tidak saja oleh relasi dengan anggota keluarga dalam dunia nyata (luring: di luar jaringan tanpa koneksi internet), tetapi juga oleh relasinya dalam dunia maya (daring: dalam jaringan melalui koneksi internet) baik dengan anggota keluarga maupun dengan orang lain. Kemampuan keluarga untuk menjalankan fungsinya, terutama dalam hal sosialisasi dan penanaman nilai-nilai keluarga, pendidikan, dan peran sosial di era digital, memerlukan berbagai kompetensi, khususnya dalam hal pengasuhan di era digital yang disebut sebagai *digital parenting*.

Pengelolaan Mutu Keluarga untuk Mencapai Ketahanan Psikologis Keluarga di Era Digital

Mutu atau kualitas adalah ukuran baik buruk suatu benda atau keadaan. Kualitas juga merupakan suatu ciri sifat tentang suatu hal yang membuat hal tersebut unik. Kualitas lebih menunjukkan suatu perbedaan jenis daripada jumlah (VandenBos, 2007). Istilah mutu sering dikaitkan dengan jaminan mutu (*quality assurance*) yang berarti suatu proses sistemis yang digunakan untuk meningkatkan kualitas suatu program atau institusi dengan melakukan perencanaan,

13 Herliana, D.S., Setiawan, B., & Jiwana, G. 2018. *Digital Parenting: Mendidik Anak di Era Digital*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

pelaksanaan, dan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, ketepatan, penerimaan, ketelitian diagnosis, dan hasil. Pengelolaan mutu dimaksudkan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk terlaksananya jaminan mutu. Pengelolaan mutu keluarga perlu dilakukan agar keluarga dapat menghasilkan generasi muda yang berkualitas. Keluarga sebagai suatu sistem dan institusi sosial telah disusun dan dikembangkan untuk menjamin bahwa anak-anak muda yang dilahirkan dapat dipelihara (Berns, 2010). Untuk memperoleh gambaran mutu terkait dengan ketahanan psikologis keluarga maka perlu dikenali indikator-indikator ketahanan psikologis keluarga.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup: (1) landasan legalitas dan keutuhan keluarga, (2) ketahanan fisik, (3) ketahanan ekonomi, (4) ketahanan sosial psikologi, dan (5) ketahanan sosial budaya. Terkait itu, tulisan ini difokuskan pada aspek ketahanan psikologis.¹⁴

Dalam Perda DIY Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, pada pasal 30 dan 31 tentang pemenuhan ketahanan sosiopsikologis disebutkan: (1) Setiap keluarga bertanggung jawab menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, dan kepatuhan terhadap hukum. (2) Untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. perwujudan kesetaraan dalam pengelolaan rumah tangga; b. peningkatan sumber daya dan kualitas keluarga; c. pencegahan risiko perceraian; d. penerapan pola asuh yang baik;

14 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. *Yuk Jadi Pelopor & Pelapor (2P) untuk Mencegah Penyebaran COVID-19*.



dan e. pemulihan krisis keluarga. Berdasarkan Perda ini selanjutnya dilaksanakan program kegiatan yang menunjang tercapainya ketahanan sosial psikologis keluarga. Intervensi ini disebut sebagai intervensi makro, yaitu melalui kebijakan dan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain intervensi makro, perlu juga dikembangkan intervensi mikro yang dilaksanakan oleh keluarga itu sendiri. Menurut Olson, DeFrain, dan Skogrand (2019), ketahanan psikologis keluarga merupakan hasil interaksi kekuatan keluarga, kekuatan komunitas, dan kekuatan budaya.¹⁵ Kekuatan keluarga dicirikan dengan enam kualitas yaitu: (1) apresiasi dan afeksi, (2) komunikasi positif, (3) komitmen keluarga, (4) menikmati waktu bersama, (5) kesejahteraan spiritualitas dan berbagi nilai-nilai, dan (6) kemampuan untuk mengelola stres dan krisis secara efektif. Karakteristik ini sesuai dengan hasil penelitian Afiatin, Subandi, dan Reginasari (2019) yang menemukan dimensi pada keluarga “Flourish” atau keluarga yang mampu bertumbuh kembang dan berfungsi optimal walaupun dihadapkan pada tantangan-tantangan berat dalam kehidupan. Ada delapan kualitas yang dimaksud, yaitu: (1) afeksi positif; (2) *keberfungsian* psikologis; (3) *keberfungsian* sosial; (4) komunikasi asertif; (5) persekutuan keluarga dalam menghadapi tantangan; (6) memiliki nilai-nilai keyakinan, budaya, dan kearifan lokal; (7) istri tangguh yang memiliki komitmen keluarga, dan (8) suami yang menjadi pemimpin yang baik.¹⁶

15 Olson, D. H., DeFrain, J., & Skogrand, L. 2019. *Marriages and Families. Intimacy, Diversity, and Strengths*. New York: McGraw-Hill Education.

16 Afiatin, T., Subandi, dan Reginasari, A. 2019. *Dinamika Relasi Keluarga pada Flourish Family. Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.

Untuk mewujudkan ketahanan psikologis keluarga sebagaimana telah disebutkan karakteristiknya maka pembentukan suatu keluarga harus direncanakan dengan baik, misalnya melalui program pendidikan keluarga bagi calon suami dan calon istri. Materi dan metode program pendidikan keluarga perlu disesuaikan dengan tantangan yang akan dihadapi oleh keluarga pada masanya. Pada era digital ini, salah satu tantangan yang dihadapi oleh keluarga, yaitu adanya penetrasi budaya asing melalui media digital sehingga orang tua perlu memiliki kemampuan digital *parenting* yang baik. Untuk itu maka diperlukan literasi digital bagi calon suami dan calon istri yang selanjutnya akan menjadi orang tua.

Literasi media digital merupakan kemampuan yang efektif untuk memahami dan memanfaatkan isi atau mengatur isi media massa. Kemampuan yang ditunjukkan adalah membaca, menulis, mengenali tanda-tanda grafis yang dipakai manusia untuk berkomunikasi yang mewakili ujaran, dengan mengetahui secara sepenuhnya dalam berkomunikasi atau bertukar data serta informasi melalui media digital dalam jaringan (*online*).

Menurut Park (2012), ada enam dimensi literasi media digital, yaitu dimensi literasi perangkat yang terdiri dari akses, pemahaman, dan penciptaan atau kreasi; dan dimensi literasi isi yang terdiri dari akses, pemahaman, dan penciptaan.¹⁷ Secara rinci, masing-masing dimensi terdapat dalam Tabel 1.

17 Park, S. 2012. Dimentions of Digital Media Literacy and the Relationship with Social Exclusion. *Media International Australia*. (142): 87-100.



Tabel 1 Dimensi Literasi Media Digital

| | Literasi Perangkat | Literasi Isi |
|------------------------|---|--|
| Akses | Kepemilikan perangkat untuk mengakses layanan. | Kemampuan untuk mencari, menemukan, dan menyaring informasi yang relevan. |
| Pemahaman | Memahami dasar-dasar teknologi dan mengenal bagaimana mengoperasikan pada tingkat kegunaan. | Kemampuan untuk memahami dan secara kritis menganalisis isi informasi. |
| Penciptaan atau kreasi | Kemampuan untuk menghasilkan kembali dan menciptakan isi informasi menggunakan teknologi digital. | Kemampuan membentuk opini, ide, dan mengubah informasi ke dalam bentuk digital. Pengetahuan dan kesadaran tentang dampak sosial, etiket, dan etika di dunia siber. |

Badan Litbang SDM Kominfo (Syarifudin, 2014) menyatakan bahwa literasi media digital dikategorikan dalam lima tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat nol, yaitu ketika individu sama sekali tidak tahu dan tidak peduli akan pentingnya informasi dan teknologi untuk kehidupan sehari-hari.
- b. Tingkat satu, yaitu ketika individu pernah memiliki pengalaman satu atau dua kali menggunakan teknologi informasi untuk mencapai keinginan dan pemecahan masalah.

- c. Tingkat dua, yaitu ketika individu telah berkali-kali menggunakan teknologi untuk membantu aktivitas sehari-hari dan telah memiliki pola *keberulangan* dalam penggunaannya.
- d. Tingkat tiga, yaitu ketika individu telah memiliki standar penguasaan dan pemahaman terhadap informasi dan teknologi yang diberlakukannya dan secara konsisten mempergunakan standar tersebut sebagai acuan penyelenggaraan aktivitas sehari-hari.
- e. Tingkat empat, yaitu ketika individu telah sanggup meningkatkan secara signifikan kinerja aktivitas kehidupan sehari-harinya melalui pemanfaatan informasi dan teknologi.
- f. Tingkat lima, yaitu ketika individu telah menganggap informasi dan teknologi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari dan secara langsung maupun tidak langsung telah mewarnai perilaku dan budaya hidupnya.¹⁸

Individu yang memiliki literasi media digital yang baik maka ia akan mampu memilih, mengkritisi, mengevaluasi keaslian, *keterpercayaan*, dan kredibilitas sumber informasi; serta memiliki kesadaran tentang etika dunia siber serta dampak sosial terhadap isi informasi yang diciptakan. Dengan kemampuan literasi media digital yang baik, individu tidak akan mudah tersesat atau terjebak dalam penyimpangan informasi serta dapat menggunakan secara bijaksana sehingga dapat terhindar dari *technoference*. Jargon yang sering digunakan agar bijak dalam penggunaan media digital adalah “Saring sebelum *sharing*” dan “Kuasai teknologi agar Anda tidak dikuasai teknologi”.

18 Syarifudin. 2014. Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. 17(2): 153-164.



Literasi digital juga diperlukan ketika masa pandemi Covid-19 banyak aktivitas bekerja dan belajar dilakukan secara daring. Sebagaimana disebutkan dalam program Ditjen Dikti Kemendikbud bahwa salah satu langkah strategis menghadapi Covid-19 adalah memperkuat platform pembelajaran daring, menegosiasi internet *provider* untuk membebaspulsakan laman pendidikan dan paket internet ramah kantong mahasiswa.¹⁹

Simpulan

Upaya penanggulangan Covid-19 untuk mengurangi bertambahnya kasus baru adalah pencegahan penyebarannya. Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, masyarakat secara menyeluruh perlu melaksanakan protokol kesehatan dan menjalankan pola hidup sehat. Bagi sebagian besar masyarakat, menjalankan protokol kesehatan dan menjalani pola hidup sehat memerlukan kemampuan adaptasi dan perubahan perilaku dan kebiasaan. Tidak sedikit masyarakat yang masih tidak patuh dan tidak disiplin melaksanakannya. Untuk itu diperlukan proses pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh keluarga, mengingat keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama bagi individu.

Keberhasilan pendidikan bagi generasi muda sangat dipengaruhi oleh *keberfungsian* keluarga. Keluarga fungsional yang memiliki karakteristik ketahanan psikologis keluarga, yaitu adanya (1) afeksi positif; (2) *keberfungsian* psikologis; (3) *keberfungsian* sosial; (4) komunikasi asertif; (5) persekutuan keluarga dalam menghadapi

19 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Program Mitigasi COVID-19. Dukungan Kampus untuk Mitigasi.*

tantangan; (6) memiliki nilai-nilai keyakinan, budaya dan kearifan lokal; (7) istri tangguh yang memiliki komitmen keluarga; dan (8) suami yang menjadi pemimpin yang baik, merupakan lahan yang subur untuk menumbuh kembangkan potensi anggota keluarga sehingga menjadi individu yang tangguh dan bermanfaat.

Di era digital ini, ketahanan psikologis keluarga juga dipengaruhi oleh literasi digital anggota keluarga, yaitu kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan serta mengatur isi media massa. Kemampuan yang ditunjukkan adalah membaca, menulis, mengenali tanda-tanda grafis yang dipakai manusia untuk berkomunikasi yang mewakili ujaran, dengan mengetahui secara sepenuhnya dalam berkomunikasi atau bertukar data serta informasi melalui media digital dalam jaringan (*online*).

Dengan literasi digital yang baik, orang tua juga akan memiliki kemampuan *digital parenting* yang baik pula. Dengan kemampuan *digital parenting* yang baik, kemungkinan besar orang tua akan mampu mendampingi, memantau, dan memberi arahan bagi anak-anaknya untuk menggunakan media digital secara sehat, produktif, dan bermanfaat.

Dengan kemampuan *digital parenting* yang baik pula maka orang tua memiliki cara pengasuhan yang sesuai dengan karakteristik generasi milenial, termasuk di dalamnya dalam proses *psikoedukasi* serta penanaman kepatuhan dan kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan dan menjaga imunitas untuk pencegahan persebaran Covid-19.



Dalam upaya membekali para orang tua dan calon orang tua kemampuan literasi digital dan *digital parenting*, desa perlu merancang program pelatihan literasi digital dan *digital parenting*. Dalam pelaksanaannya, desa dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang telah melaksanakan proses pembelajaran dengan MOOC (*Masive Open Online Course*). Melalui program pembelajaran MOOC, psikologi keluarga dan pernikahan, bahan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dapat diakses oleh siapa pun dan di mana pun secara gratis. Melalui kerja sama desa dan perguruan tinggi, pengelolaan mutu keluarga di era digital memungkinkan untuk dapat dipersiapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara kolaboratif dan komprehensif.

Profil Penulis

Seorang pakar psikologi keluarga dan *konsen* pada peran keluarga dalam menghadapi kehidupan new normal. Karena menurutnya, keluarga punya peran vital untuk memengaruhi perubahan perilaku anggota keluarga. Selain itu, Dosen Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada ini, juga *konsen* dengan parenting digital, yakni bagaimana peran orang tua mampu beradaptasi dengan perubahan era digital.

Prof. Dr. Tina Afiatin, M. Si. menyatakan bahwa parenting digital sangat berperan dalam meningkatkan ketahanan psikologi keluarga. Gagasan tersebut juga ia tuliskan dalam buku terbitan 2018 berjudul *Psikologi Perkawinan dan Keluarga: Penguatan Perkawinan dan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*.

Menurutnya, di era digital, ada banyak nilai-nilai masa lalu di keluarga yang akan selalu dirindukan. Termasuk berupa suasana kebersamaan yang hangat dan akrab, serta tradisi masing-masing keluarga. Karena, meski semua hal seolah telah diselesaikan secara digital, tetapi menurut Tina, komunikasi, apresiasi, dan interaksi antaranggota keluarga, tetap berperan penting dalam kemampuan mengelola stres dan ketahanan psikologi keluarga.





Inspirasi dari Desa untuk Indonesia Baru²⁰

Dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG., (K).²¹

Desa adalah segala-galanya. Lahir dan tumbuh di desa membuat saya memiliki banyak inspirasi dan teladan, memberikan pelajaran untuk hidup saling bergotong royong. Kesederhanaan dalam kehidupan desa secara tidak langsung telah mendorong saya

20 Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 10 Juli 2020, Seri 16: Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru dan disarikan oleh Asy Syaffa Nada. A

21 Dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Sardjito, Yogyakarta dan pernah menjabat sebagai Kepala Instansi Kesehatan Reproduksi dan Bayi Tabung. Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

untuk berkarya yang berkepribadian Indonesia. Sebab, petuah orang tua serta filosofi yang mengakar di desa, seperti “*Durung pecus keselak besus*” menjadi pengingat bagi saya dalam menjalani kehidupan. Dengan kehidupan di desa, saya belajar mengenai kemandirian ekonomi, lebih sabar untuk mendengar dan menerima pendapat orang lain melalui penerapan musyawarah.

Kesederhanaan dalam kehidupan desa, membuat keluarga bahagia meski tidak selalu cukup harta. Melalui kebersamaan dalam gotong royong, warga masyarakat desa hidup rukun dengan baik, saling bahu membahu berdasar asas kekeluargaan. Penerapan kerja sama tersebut dapat dilihat dari contoh konkret penyelenggaraan bedah rumah di Kulon Progo. Tanpa APBD ataupun APBN, 1.600 rumah bisa dibedah selama kurun waktu 5 tahun. Dana bedah rumah murni berasal dari pemberdayaan gotong royong masyarakat desa yang hidup dengan semangat kekeluargaan yang tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa kekeluargaan dalam desa menjadi kekuatan besar yang luar biasa.

Desa adalah keluarga. Maka tidak heran jika desa selalu menjadi tempat untuk kembali dari mana pun kita pergi. Terutama dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, banyak perantau memilih kembali ke desa, pulang ke keluarganya. Begitu pula dengan masalah apa pun yang terjadi, mulai dari politik, ekonomi, hingga kesehatan. Oleh karena itu, banyak *pitutur* lahir dari kesunyian desa yang menyuguhkan kehidupan sederhana. *Pitutur* lahir itu lahir dari keluarga di desa, terus berkembang dan menjadi sebuah pembelajaran.



***Pitutur* Luhur Desa untuk Kemajuan Indonesia**

Banyak *pitutur* luhur hadir dari pembelajaran masa lalu para pendahulu. Kita pun dapat menemukan berbagai *pitutur* yang diajarkan oleh keluarga di desa. Di Jawa Tengah, banyak *pitutur* luhur muncul dalam bentuk peribahasa yang diambil dari pembelajaran kehidupan. Misalnya, *pitutur* yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara yang berbunyi, “*Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*” yang berarti ‘di depan memberi contoh, di tengah menyemangati, dan di belakang mendorong sekaligus menguatkan’. *Pitutur* tersebut lahir dari warga desa dan menjadi sebuah dasar yang penting untuk diterapkan dalam membangun bangsa.

Tidak hanya itu, *pitutur* yang hadir dalam keluarga dan diterapkan dalam kehidupan desa menempatkan pemimpin di tempat rendah sebagai pelayan yang *andap asor*, selalu menjaga perasaan yang dilayani sehingga memiliki empati tinggi dalam kepemimpinannya. Hal itu dapat dipelajari dari beberapa *pitutur* luhur yang saya ingat, di antaranya, “*Menang tanpo ngasorke, sugih tanpo bondho, nlurug tanpo bolo.*” Kita dapat menjadi teladan, memiliki *personal mastery* yang hebat ketika bisa mengalahkan orang tanpa harus merendharkannya. Begitu pula untuk menjadi kaya, tidak selalu harus dengan harta.

Kredibilitas seorang pemimpin (*ethos, pathos, dan logos*) lahir dari tengah keluarga. Sehingga, keluarga memiliki peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai luhur yang berasal dari ajaran kehidupan desa. Untuk itu, membangun bangsa tidak selalu harus memberikan orientasi pada desa dengan berbicara tentang hubungan

anak-ibu dan suami-istri. Ada perspektif yang lebih luas yang dapat ditelusuri, yaitu memaknai lebih dalam *pitutur* luhur yang lahir dari desa.

Pitutur luhur dapat berguna untuk diterapkan sebagai pedoman batas tingkah laku dalam menjadi pemimpin. Kita mengenal *pitutur*, “*Ojo adigang, adigung, adiguno*” sebagai pengingat untuk tidak menjadi arogan. Selain itu, ada pula, “*Ojo rumongso biso, nanging biso rumongso*” yang dapat menggugah kesadaran kita agar tidak menjadi manusia sombong dan suka berbohong. Untuk itu, kita perlu menggali nilai-nilai luhur yang hadir dari desa dan keluarga dengan lebih dalam. Terutama ketika ingin menjadi pemimpin bagi warga masyarakat.

Untuk menjadi pemimpin yang sempurna memang tidak pernah mudah. Bahkan, Sunan Kalijaga memberikan *pitutur*-nya ketika kita hendak mencari pemimpin yang sempurna. Bunyi nasihat beliau adalah, “*Goleko tenggu sing gedene sak wungkal, bungkusen nganggo godhong asem, sindikono nganggo alu.*” Artinya, jika ingin mencari pemimpin yang sempurna, carilah tengu sebesar *wungkal* (untuk mengasah pisau), bungkuslah dengan daun asam, dan tusuk menggunakan alu.

Berkaca dari Kemandirian Desa

Ketika menjabat menjadi Bupati Kulon Progo pada 2011-2016, saya meluncurkan program Bela dan Beli Kulon Progo. Program tersebut ditujukan agar warga masyarakat desa dapat menciptakan kemandirian tanpa harus mendapatkannya dari luar. Program itu wajib diterapkan oleh seluruh warga masyarakat Kulon Progo.



Bahkan ketika ada produk luar daerah masuk, pemerintah daerah tidak boleh serta-merta menerimanya. Harus dilakukan negosiasi agar masyarakat asli Kulon Progo dapat terlibat.

Program gerakan menghargai dan mengapresiasi produk lokal itu dimulai dengan kebijakan wajib menggunakan batik *gebleg renteng*. Penggunaan wajib batik khas Kulon Progo ini diperuntukkan bagi pelajar dan pegawai negeri sipil (PNS). Hasilnya, kebijakan ini mampu mengembangkan industri batik lokal dan meningkatkan perekonomian para pengrajin.

Selain itu, Kulon Progo juga telah berhasil membuat produk air mineral daerah berbentuk kemasan untuk warga lokal dengan label Air Ku—Air Kulon Progo, air kemandirian, air saya. Bersama PDAM Tirta Binangun, kami mengoptimalkan potensi daerah dan memanfaatkannya untuk kemandirian ekonomi lokal. Sehingga, warga masyarakat tidak bergantung pada produk luar, terutama dari luar negeri. Itu bukan berarti saya membenci asing, melainkan saya lebih mencintai kemandirian.

Tidak hanya program Bela dan Beli Kulon Progo, pemerintah daerah pun memberdayakan gerakan Pro Beras untuk kelompok tani dan pengusaha kecil. Kami melarang beras dari luar Kulon Progo untuk masuk. Sehingga, produksi beras di Kulon Progo berasal dari hasil tani warga masyarakat setempat. Agar meningkatkan kesadaran untuk membeli produk beras sendiri, pemerintah Kulon Progo menerapkan kebijakan bagi PNS untuk membeli beras lokal dan mewajibkan pembagian beras raskin menggunakan beras lokal. Untuk itu, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas beras dengan mengembangkan varietas baru bagi produksi beras premium Kulon

Progo agar dapat menjadi produk beras premium organik yang tidak kalah dengan produk lainnya.

Sedangkan melalui peraturan daerah, toko waralaba yang berasal dari luar dan berniat untuk buka di daerah Kulon Progo, diatur agar dapat berjejaring dengan warga lokal. Toko waralaba diambil alih oleh koperasi milik masyarakat dan diberi nama Tomira, Toko Milik Rakyat. Di dalam toko tersebut, diwajibkan adanya *display* produk-produk *home industry* warga masyarakat Kulon Progo. Seperti produk *hand sanitizer* asli buatan Kulon Progo yang diberi nama Henklin-Ku.

Bahkan dalam urusan pulsa, Kulon Progo juga mampu membuat *provider* khusus dan menciptakan kartu perdana untuk keluarga yang diberi nama Pulsa-Ku. Kemandirian dalam memaksimalkan potensi daerah, pada dasarnya mampu membangkitkan ekonomi keluarga. Produk-produk lokal *home industry* hasil dari pemberdayaan warga masyarakat lokal dapat menjadi strategi dalam menghadapi ancaman ekonomi. Kemandirian produksi, saling bela dan membeli produk lokal, menjadi kunci kesejahteraan daerah karena dapat mendorong perputaran uang agar terus tumbuh di masyarakat.

Pentingnya Membangun Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga penting untuk dikembalikan, terutama di masa pandemi Covid-19 agar kita memiliki kemandirian. Sebab, bukan hanya mengancam kesehatan, Covid-19 pun membuat perekonomian terseret goyah. Ketika ekonomi rakyat terganggu, negara pun terancam. Untuk itu, melalui pemaparan kemandirian produk yang diterapkan di Kulon Progo sebelumnya, saya mencoba



untuk memberikan sebuah contoh kecil agar kita dapat bersama-sama mendorong ekonomi keluarga dari desa.

Melalui sistem ekonomi kerakyatan, ekonomi keluarga dapat bergeliat tumbuh. Sehingga, perlu ditekankan bahwa memaksimalkan produk lokal, terutama yang berbasis *home industry*, dapat menjadi cara efektif untuk mewujudkan kemandirian warga masyarakat terutama di bidang ekonomi. Kita perlu saling bekerja sama, mengutamakan pemberdayaan produk lokal agar dapat terus tumbuh. Intinya, *dari rakyat untuk rakyat*.

Banyak hal dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi keluarga dari desa. Transformasi teknologi menjadi salah satunya. Saat ini berbagai platform untuk menjadi wadah dalam meningkatkan ekonomi, seperti *e-commerce*, *e-market*, *marketplace*, dan *online shop* berlarut-larut di internet. Kehadiran *startup* yang berkembang perlu disalurkan manfaatnya kepada warga masyarakat desa. Terutama dalam situasi pandemi Covid-19, kita perlahan mulai memasuki era *megadisruption* yang mendorong terjadinya *deglobalisasi*, proses berkurangnya saling ketergantungan dan integrasi antarnegara.

Momen Covid-19 dapat menjadi kesempatan bagi kita untuk kembali merebut ekonomi yang dikuasai oleh rakyat. Kita dapat bekerja sama menghidupkan desa, melalui usaha kecil dan menengah (UMKM) hingga usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS). Hal ini menjadi kesempatan bagus, sekaligus menjadi peluang dalam memperkokoh ekonomi keluarga.

Pada dasarnya, ekonomi di desa dan keluarga dapat dibangun oleh negara dengan cara sosialis ataupun kapitalis. Untuk ekonomi kapitalis, sebenarnya tidak selalu bermakna pada pemenuhan

kebutuhan ekonomi yang banyak melibatkan swasta. Namun, sistem ekonomi kapitalis juga dapat dilakukan dengan membangun swasta dari bawah, menerapkan *bottom up* ekonomi yang dimulai dari keluarga, masyarakat, kemudian negara. Sistem tersebut lebih cocok diterapkan di Indonesia. Sehingga, penting sekali untuk merangkul UKM, membangun ekonomi keluarga, dan mencapai kemandirian ekonomi di desa.

Penutup

Memperjuangkan kemandirian ekonomi warga masyarakat, tentu bukanlah sebuah hal mudah. Selalu ada tantangan yang cukup besar dalam upaya mengubah suatu tatanan. Sehingga, kita membutuhkan kekuatan serta keteguhan hati yang didasarkan pada *pitutur* luhur dari desa agar memiliki integritas. Kita harus teguh, konsisten, dan dapat dipercaya—memiliki visi ke depan.

Perubahan tidak mustahil untuk diwujudkan. Pandemi Covid-19 ini dapat menjadi batu pijakan untuk melakukan penguatan ekonomi suatu bangsa yang dimulai dari ekonomi keluarga di desa. Hadirnya berbagai UKM di tengah Covid-19 yang terus bertambah, menjadi sebuah pertanda bahwa ekonomi dapat dibangun dari keluarga, terutama dengan memberikan edukasi kepada keluarga dalam pemanfaatan berbagai platform pemasaran produk.

Ekonomi keluarga membangkitkan ekonomi kerakyatan yang saling berkesinambungan. Dari desa, kita dapat terinspirasi untuk menciptakan tatanan baru dengan menerapkan nilai-nilai kekeluargaan desa: musyawarah, gotong royong, dan kerja sama. Mari kuatkan keluarga dengan tekad kuat, inovasi, dan melihat peluang tinggi untuk membangun bangsa.



Desa dan keluarga adalah kaki Indonesia. Sehingga, menguatkan Indonesia harus memperkuat keluarga dan desa. Salah satu cara untuk memperkuat keluarga dan desa, dapat dilakukan melalui penguatan ekonomi. Untuk itu, penguatan ekonomi keluarga dan desa salah satunya dapat didukung dengan kemandirian ekonomi berupa peningkatan daya beli dan penggunaan produk lokal.

Profil Narasumber

Lebih dikenal sebagai dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Sardjito, Yogyakarta. Pernah menjabat sebagai Kepala Instansi Kesehatan Reproduksi dan Bayi Tabung di rumah sakit tersebut. Tahun 1992, dedikasinya mengabdikan sebagai dokter di pedalaman Kalimantan, mendapat apresiasi dari Presiden Soeharto sebagai Dokter Teladan. Karier di dunia kesehatan mengantarkannya menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun, perjalanan dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG. tidak hanya di bidang kesehatan. Ia juga punya pengalaman di jalur politik. Karena baginya, kedua jalur tersebut berujung sama, yaitu mengabdikan untuk masyarakat.

Lahir di Desa Hargowilis, Kulon Progo, Yogyakarta, tidak menyurutkan impian besarnya. Bahkan ia bangga sebagai anak desa yang akhirnya menjadi Bupati Kulon Progo selama dua periode, yaitu periode 2011-2016 dan 2016 hingga akhirnya mundur pada 2019—untuk menjadi Kepala BKKBN. Dan sepanjang menjabat bupati tersebut, Hasto dikenal dengan kampanye Bela Beli Kulon Progo. Gerakan untuk membangun kesadaran lebih mengutamakan konsumsi produk lokal.



Membangun Ketangguhan Keluarga dari Desa²²

Alissa Wahid²³

Di tengah pandemi Covid-19, ada satu dari sekian banyak peran yang dibutuhkan seseorang untuk bertahan, yaitu peran keluarga. Selain dampak sosial dan ekonomi, pandemi juga berdampak pada keluarga. Orang tua bekerja dari rumah, anak-anak

-
- 22 Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 10 Juli 2020, Seri 16: Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru dan disarikan oleh Diah Rizki Fitriani.
 - 23 Aktif menjadi manager Indonesia Planned Parenthood Association (1991-1996) yang fokus pada pengembangan anak muda dan kesehatan reproduksi. Penggagas jaringan Gusdurian dan Psikolog Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama.

belajar dari rumah. Anggota keluarga berkumpul dan menghabiskan banyak waktu bersama di rumah. Namun, tidak semua waktu yang dihabiskan di rumah menjadi waktu yang berkualitas dan menyenangkan.

Banyak cerita memilukan yang saya dapat dari Twitter tentang masalah keluarga di masa pandemi. Seorang karyawan *customer service* mengatakan jika ia beberapa kali melihat pasangan suami istri bertengkar di depan banyak orang perkara utang. Seorang ibu bercerita bagaimana dia menampar anaknya karena terlalu asyik menonton Netflix dari pagi sampai malam. Terakhir, seorang remaja yang menanggung beban ketika melihat bapaknya berlaku kasar pada ibu dan saudara-saudaranya, tetapi dia tidak mampu berbuat apa-apa. Beberapa contoh tersebut adalah situasi nyata di masa pandemi saat ini.

Kita semua menyadari jika permasalahan dalam keluarga bukan hal yang tiba-tiba muncul. Ada beberapa hal yang memengaruhi munculnya persoalan-persoalan di dalam bangunan keluarga. *Pertama*, ketika pandemi, saat semua orang berada di rumah, ruang privasi anggota keluarga menjadi mengecil. Tiap anggota keluarga harus berbagi ruang dengan anggota keluarga lainnya. *Kedua*, ayah dan ibu sering kali mengalami tekanan psikologis terkait ketidakpastian masa depan. Mereka tidak tahu kapan masuk kerja secara normal, atau kapan anak-anak mulai kembali ke sekolah. Selain itu, *ketiga*, ayah dan ibu menjalani peran sebagai orang tua secara penuh, 24 jam, yang masih harus ditambah sebagai guru pengganti karena anak-anak belajar dari rumah. Banyak orang tua yang mengeluh menghadapi situasi ini. Sehingga ketegangan antara

orang tua dengan anak meningkat. Namun, di sisi lain kematangan orang tua dapat dilihat dari dampak interaksi mereka terhadap keluarga, apakah mereka hadir secara fisik saja, ataukah juga secara psikis.

Konsep Bangunan Keluarga

Kementerian Agama dalam bimbingan perkawinan calon pengantin memberikan satu materi penting tentang konsep bangunan keluarga. Konsep ini dipakai oleh hampir semua kantor urusan agama (KUA) dan Kemenag kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Di dalam konsep bangunan keluarga, perilaku komunikasi antarpasangan, kekerasan, dan juga ekonomi keluarga menjadi *output* dari bangunan keluarga. Dalam membangun ketangguhan keluarga, konstruksi bangunan harus dikuatkan.

Jika dilihat dari sisi atas, atap merupakan penutup bangunan. Jika ditarik dalam konteks bangunan keluarga, bangunan keluarga yang baik menggunakan perspektif kemaslahatannya. Perspektif kemaslahatan berarti kebaikan bagi seluruh anggota keluarga yang ada di dalam bangunan itu, maupun kebaikan yang dibawa oleh anggota keluarga kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini juga dapat diartikan bahwa apa pun yang terjadi di dalam bangunan atau rumah itu, semuanya harus berangkat dari perspektif kemaslahatan atau kebaikan bersama.

Ketika kita mengetahui seorang anak dalam sebuah keluarga tidak dapat bersekolah hanya dikarenakan dia terlahir sebagai perempuan maka dapat dipastikan atap bangunan keluarga itu belum mapan. Atap bangunan keluarga menjadi mapan ketika



disokong dengan pilar-pilar yang kuat. Pilar-pilar tersebut hanya bisa berdiri tegak dan kokoh ketika fondasi bangunan keluarga kuat dan dalam. Maka dari itu, fondasi bangunan keluarga harus diutamakan. Tiga prinsip sebagai fondasi untuk sebuah bangunan keluarga yang tangguh yaitu, prinsip keadilan bagi seluruh anggota keluarga, prinsip kesalingan atau prinsip *mubadalah*, dan prinsip keseimbangan.

Keadilan bagi seluruh anggota keluarga bisa diilustrasikan dalam praktik komunikasi keluarga. Sebaik apa pun teknik komunikasi yang digunakan dalam keluarga, ketika orang tua tidak membangun hubungan mereka dengan anaknya di atas prinsip keadilan, kemaslahatan bersama tidak akan bisa tercapai. Maka dari itu penting untuk menegakkan keadilan di dalam keluarga.

Kedua, prinsip kesalingan atau prinsip *mubadalah*. Prinsip ini mengandalkan bahwa setiap anggota keluarga berkontribusi dalam keluarga. Saling memberi, saling menerima, dan saling menjaga. *Mubadalah* juga merupakan prinsip penting dalam keluarga. Dalam banyak cerita, anggota keluarga tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di banyak keluarga juga terdiri dari kakek-nenek dan cucu-cucu, atau hanya kakek-nenek dan anak-anak yang sudah berkeluarga. Di lain kondisi, keluarga bisa terdiri dari anggota-anggota keluarga lainnya. Prinsip kesalingan atau *mubadalah* ini penting agar semua orang yang ada dalam keluarga terus berinteraksi dengan harmonis.

Prinsip ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga penting untuk membentuk

kesadaran tanggung jawab. Tidak hanya keseimbangan antara peran anggota keluarga dalam kadar domestik, tetapi juga publik. Selain itu pula diperlukan juga keseimbangan antara peran sebagai pribadi utuh dengan sebagai anggota keluarga.

Fondasi yang kokoh nantinya akan menopang pilar-pilar yang akan menjadi pegangan bagi anggota keluarga untuk mempertahankan bangunan keluarga. Pilar penopang pertama adalah perspektif berpasangan bagi suami istri; kedua, komitmen bagi seluruh anggota keluarga; ketiga adalah saling berlaku baik antaranggota keluarga; keempat, musyawarah sebagai bentuk untuk mewujudkan keadilan, kesalingan, dan keseimbangan; dan terakhir, kerelaan atau rida.

Seluruh pilar dalam keluarga harus didasari dengan rasa adil, saling, dan seimbang. Sehingga potensi keluarga akan reaktualisasikan dengan baik dan menghasilkan jiwa yang tenteram dan penuh kasih sayang dalam bangunan keluarga.

Jika bangunan keluarga dibangun dengan fondasi yang kokoh dan pilar-pilar yang tegak maka ketika di kemudian hari terjadi “gempa keluarga”, niscaya tidak akan meruntuhkan, baik hubungan antaranggota keluarga maupun bangunan keluarga itu sendiri. “Gempa keluarga” bisa terjadi, misalnya ketika anak laki-laki diberi *privilege* yang lebih besar daripada anak perempuan. Saat keluarga meminta anak laki-laki untuk mencari nafkah, sementara anak perempuan dituntut menikah, hal ini merupakan suatu ketidakadilan di dalam keluarga.



Selain ketidakadilan, “gempa keluarga” juga dapat terjadi karena kondisi ekonomi, misalnya yang terjadi di masa pandemi seperti saat ini. Konflik dan kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi pemicu “gempa keluarga”. Terutama ketika konflik dan kekerasan terjadi dalam keluarga dengan tindak perkawinan berisiko, seperti perkawinan anak di bawah umur, poligami, perkawinan tidak tercatat, hingga hubungan jarak jauh.

Inovasi Ketahanan Keluarga Pascapandemi

Berbagai hal tidak dapat diprediksi di masa “*new normal*”, termasuk ketahanan bangunan keluarga. Menata harapan dan hubungan di dalam keluarga, dinilai mampu memperkuat ketahanan keluarga di masa pandemi maupun sesudah pandemi. Anggota keluarga harus membuat kesepakatan-kesepakatan baru dengan tetap berpegang pada tiga prinsip dasar bangunan keluarga: keadilan, kesalingan, dan keseimbangan.

Setiap anggota keluarga harus aktif mengambil perannya masing-masing untuk memperkuat bangunan keluarga. Sayangnya, banyak masyarakat yang terjebak pada hal-hal yang sifatnya permukaan. Misal, hanya melihat kondisi dan perilaku keluarga: sakinah atau tidak, terjadi konflik dan kekerasan atau tidak, atau sekadar persoalan perkawinan anak di bawah umur. Padahal jika lebih diteliti, banyak hal yang terlihat remeh atau terabaikan, yang justru pemicu “gempa keluarga”.

Sistem struktural masyarakat di satu sisi menjadi kekuatan sekaligus kelemahan dalam pranata sosial, misal dalam kasus perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan anak di bawah

umur bisa dikategorikan sebagai sebuah budaya komunal dan dilanggengkan oleh masyarakat. Pemahaman keluarga, justifikasi praktik beragama, budaya patriarki yang mengakar, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat, pendidikan dan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan kesejahteraan, serta bagaimana pemerintah desa mengelola permasalahan desa, menjadi pemicu problem struktural yang kerap dihadapi.

Perspektif keluarga tentang perempuan atau anak perempuan seakan mengakar di masyarakat kita. Mitos bahwa pendidikan bagi anak perempuan itu tidak menjanjikan, masih diyakini. Sehingga perempuan dituntut untuk segera dinikahkan agar menghindari zina, menjadi faktor yang paling besar pelanggaran putusnya pendidikan bagi anak dan juga pernikahan anak perempuan.

Selain itu, perspektif jika keluarga adalah urusan atau ranah pribadi tanpa campur tangan pihak luar, menjadi persoalan lain. Terutama ketika program Bina Keluarga belum menjadi prioritas. Praktik-praktik dalam ranah birokrasi masih *activity oriented* dan formalistik. Pemerintah hanya menjalankan program ketika direncanakan dan telah disetujui oleh atasan, bukan berangkat dari fenomena dan persoalan yang lahir di masyarakat.

Di masa pandemi seperti sekarang yang paling dibutuhkan masyarakat adalah inovasi, termasuk dalam membangun ketangguhan keluarga. Membangun keluarga dimulai dari membangun pribadi atau individu. Pembangunan individu akan mengarahkan kita pada keluarga yang harmonis, masyarakat yang baik, negara yang makmur. Oleh karena itu, perlu menata dan memikirkan ulang langkah-langkah strategis mewujudkan ketangguhan keluarga melalui desa.



Jika kita melihat dari perspektif desa, desa sesungguhnya memiliki keunggulan dalam proses membangun ketanggungan keluarga. Hal tersebut dikarenakan desa memiliki guyub atau *community based*, area teritorial desa yang terbatas sehingga lebih mudah dikelola, adanya keterlibatan masyarakat yang optimal, kemandirian desa yang sangat tinggi, serta adanya dukungan dari Undang-Undang Desa yang memberikan ruang bagi desa untuk berkembang lebih optimal.

Akan tetapi, pemerintah desa tetap perlu melakukan *rethinking* dan *redesigning* pengelolaan desa. Pada tingkat tata nilai, pemerintah desa sudah seharusnya lebih berfokus untuk mengubah dan mentransformasikan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sehingga nilai-nilai tersebut menjadi nilai yang memberdayakan dan memperkuat tatanan keluarga. Misalnya, pemerintah desa dapat merancang program penguatan keluarga dengan menggunakan pemahaman bangunan keluarga yang bertujuan mencapai kemaslahatan keluarga. Selain itu, program yang bertujuan untuk merekonstruksi pandangan dan nilai-nilai terhadap anak perempuan, termasuk dalam dunia pendidikan, perlu lebih gencar dilakukan. Sehingga masyarakat desa menjadi *locus* yang kuat untuk menciptakan perubahan tatanan.

Perihal menata ulang sistem sosial, pemerintah desa dapat membangun sebuah sistem sosial yang memberi akses luas bagi perempuan dalam bidang pendidikan dan pengambilan kebijakan desa. Hal ini bertujuan agar suara para perempuan didengar dengan lebih kuat. Dengan memperbesar ruang sosial bagi perempuan, berbagai aspirasi akan lebih berwarna. Perluasan peran kelompok-

kelompok yang mengangkat isu keluarga juga diperlukan, misalkan melalui program PKK Desa.

Selain itu perlu dilakukan musyawarah yang peka terhadap persoalan keluarga dengan pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna memperkuat tata nilai dan perubahan masyarakat. Kapasitas pemerintah desa dan perangkat penguatan kualitas keluarga juga diperlukan dalam mendesain ulang ketangguhan keluarga. Selain tingkat tata nilai dan sistem sosial, inovasi ketangguhan keluarga juga harus menyentuh tingkat program. Program-program penguatan kapasitas pemerintah desa atau inovasi peningkatan pendidikan perlu dilakukan. Bimbingan-bimbingan mulai dari remaja, perkawinan, dan keluarga juga harus dirancang. Selain itu inovasi pendidikan agar anak-anak muda desa dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi dan baik juga perlu diulas.

Keluarga akan menjadi lebih tangguh dan semua berawal dari perspektif sosial dan budaya desa. Desa sebagai lingkungan terdekat keluarga harus menjadi *supporting system* terbaik bagi keluarga karena desa sebagai garda depan penyelamat keluarga dalam menghadapi krisis akibat pandemi: ketangguhan keluarga, ketangguhan desa.

Simpulan

Konflik yang berhubungan dengan ketahanan lingkungan keluarga, terutama di masa pandemi, bukan masalah yang baru atau tiba-tiba mengada. Persoalan tersebut muncul, salah satunya dikarenakan semakin kecilnya ruang privat setiap anggota keluarga di rumah, tekanan psikologis karena tidak adanya kepastian mengenai hari esok, serta tuntutan peran orang tua yang lebih



kompleks dari biasanya. Keutuhan bangunan keluarga yang berprinsip kemaslahatan, keadilan bagi seluruh anggota keluarga, dan keseimbangan perlu dikuatkan, dijaga dan dipertahankan. Pola komunikasi yang dialogis antara setiap anggota keluarga menjadi faktor penentu berdiri kokohnya konsep bangunan keluarga tersebut.

Setiap anggota keluarga juga dituntut aktif berperan sesuai dengan porsinya masing-masing dalam menjaga ketahanan keluarga. Di samping itu, edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai keberadaan perempuan dan anak, atau pembatasan ranah publik menyangkut isu-isu sensitif terkait anak dan perempuan di lingkungan keluarga, perlu dibenahi. Keluarga yang kokoh berawal dari keutuhan dan kemerdekaan pribadi atau individu sebagai anggota keluarga. Sehingga sangat dibutuhkan kebebasan ruang gerak dan sosial sesuai perannya—terutama bagi perempuan dan anak—yang dimulai dari lingkungan keluarga. Hal tersebut hanya bisa diperoleh dengan adanya inovasi dalam mewujudkan konsep ketahanan keluarga sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Profil Narasumber

Minatnya pada pendidikan dan kebudayaan, tak lepas dari fokus studinya di Magister Profesi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia memilih konsentrasi pada psikologi keluarga, anak, dan wanita. Karena menurutnya ketangguhan keluarga bergantung pada fondasinya, yaitu keadilan, kesalingan, dan keseimbangan dalam keluarga.

Tahun 1991 hingga 1996, Alissa Wahid sempat aktif menjadi Manajer Indonesia Planned Parenthood Association yang fokus pada pengembangan anak muda dan kesehatan reproduksi. Lalu bersama adiknya, Yenny Wahid, ia mendirikan Gusdurian. Komunitas untuk meluaskan gagasan almarhum ayahnya, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Ia juga aktif menyampaikan pandangan politik dan kebangsaan melalui beragam forum. Seperti diskusi, seminar, maupun orasi budaya. Baginya kemajuan bangsa terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan dan semangat kebersamaan. Karenanya butuh terus digaungkan agar menjadi kesadaran bersama. Dan itu harus dimulai dari lingkaran terkecil, yakni keluarga. “Ketangguhan desa bisa dimulai dari keluarga dan cikal bakal ketangguhan nasional berasal dari desa,” tandasnya.





Keluarga dan Pendidikan di Era *New Normal*²⁴

*Najeela Shihab*²⁵

Yayasan Rangkul Keluarga Kita yang menginisiasi sebuah program orang tua bernama program Rangkul sudah berjalan sejak tahun 2012 dengan berfokus pada program pemberdayaan dan

-
- 24 Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal 10 Juli 2020, Seri 16: Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru dan disarikan oleh Fiqih Rahmawati.
- 25 Alumnus Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Pendiri Sekolah Cikal dengan jargon *Semua Murid, Semua Guru*. Menulis tujuh buku yang memotret dunia edukasi di Indonesia. Salah satunya serial tiga buku *Semua Murid Semua Guru*. Dalam buku tersebut, ia mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan dengan pendidikan. Sehingga arah pendidikan menjadi jelas dan dapat sebagai pedoman bagi negara untuk berkembang.

pendidikan keluarga. Yayasan ini memiliki tujuan untuk mendorong orang tua agar mampu berdaya dengan terus menjadi sumber belajar yang efektif dan berbagi praktik pengasuhan yang baik untuk mendukung tumbuh kembang anak.

Peserta yang mengikuti program ini pada tahun 2019 sebanyak 164.000 orang tua dengan sekitar 10% memiliki kemampuan membaca yang rendah dan tinggal di daerah terpencil dengan akses yang terbatas.²⁶ Kondisi ini mengungkapkan fakta jika, baik di kota maupun desa, memiliki kondisi sosial ekonomi menengah ke atas maupun keluarga rentan, membutuhkan dukungan terkait pendidikan keluarga, serta dukungan untuk orang tua agar bisa terus belajar menghadapi tantangan zaman dalam pengasuhan. Oleh karenanya, pendidikan keluarga menjadi esensial.

Prinsip Cinta

Yayasan Keluarga Kita mengedepankan prinsip cinta dalam membimbing keluarga, dengan harapan dapat menciptakan generasi masa depan yang cemerlang.²⁷ Pada dasarnya, prinsip cinta ini dimulai dari titik saling percaya antara orang tua dan anak. Menurut Tutu April Ariani²⁸ dalam tesisnya, cinta dan kasih sayang dari orang tua merupakan faktor yang mendukung *keberfungsian* keluarga karena salah satu hak anak adalah hak untuk dicintai dan dilindungi. Anak memerlukan cinta dan kasih sayang dari orang tua

26 Keluarga Kita. <https://keluargakita.com/tentang-keluarga-kita/>.

27 Prinsip Cinta. <https://keluargakita.com/prinsip-cinta/>.

28 Tutu April Ariani. 2009. *Korelasi Pola Hubungan Orang Tua-Anak dan Keberfungsian Keluarga dengan Perkembangan Anak Usia Prasekolah*. Magister Program Studi Kedokteran Keluarga. Universitas Sebelas Maret Surakarta.



agar kemudian mereka menjadi anak yang bisa memberikan kasih sayang kepada semua makhluk hidup.

Akan tetapi, dalam kenyataannya Yayasan Keluarga Kita menemukan bahwa ada cinta yang berbahaya dan cinta yang tidak bermakna. Cinta yang berbahaya yang kami maksud adalah cinta yang kemudian diwujudkan dalam bentuk orang tua yang *abusive* hingga melakukan kekerasan dalam keluarga. Sementara cinta yang tak bermakna kami definisikan sebagai cinta yang diwujudkan dalam sikap memanjakan anak, memberinya sogokan yang menurut kami bisa menimbulkan efek yang tidak baik bagi kehidupan anak di masa depan.

Pada dasarnya setiap orang tua mempunyai modal cintanya masing-masing. Oleh karenanya, setiap orang tua perlu belajar untuk menerapkan prinsip *mencintai dengan lebih baik*. Dalam Yayasan Keluarga Kita, prinsip Cinta merupakan singkatan dari *Cari Cara, Ingat Impian Tinggi, MeNerima Tanpa Drama, Tidak Takut Salah, dan Asyik Main Bersama*.

Cari Cara berkaitan dengan proses pengasuhan yang merupakan perjalanan dengan tujuan jangka panjang. Anak dan keluarga membutuhkan proses dan struktur yang berbeda dalam setiap tahap perkembangannya, oleh karenanya, cari cara pengasuhan yang konsisten dan efektif.

Ingat Impian Tinggi artinya setiap keluarga memiliki impian yang tinggi yang kemudian menurunkan kecenderungan positif pada setiap anggota keluarga. Setiap anak memiliki potensi untuk melakukan sesuatu dengan berhasil dan orang tua harus percaya bahwa anak mampu melakukannya.



MeNerima Tanpa Drama artinya memahami kebutuhan anak tanpa syarat dan menumbuhkan potensi anak tanpa kekerasan. Hal ini berkaitan dengan mencintai anak secara tulus, khususnya saat menghadapi tantangan dan tekanan emosi dalam keluarga.

Tidak Takut Salah berkaitan dengan proses belajar. Perlu dipahami bahwa tidak ada keluarga yang sempurna, oleh karenanya proses belajar dibutuhkan setiap waktu dan diperlukan rasa tidak takut untuk berbuat kesalahan. Refleksi dan adaptasi harus selalu dipraktikkan karena siklus pengasuhan memiliki pengaruh lintas generasi.

Asyik Main Bersama berkaitan dengan interaksi antara orang tua dan anak. Dibutuhkan keterlibatan dari setiap anggota keluarga untuk menggunakan waktu menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus bermakna.

Yayasan Keluarga Kita mengembangkan tiga kurikulum yang terdiri dari hubungan reflektif, disiplin positif, dan belajar efektif. Hubungan reflektif berkaitan dengan bagaimana berbicara dengan orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak, misalnya hubungan antara suami-istri, dengan mertua, tetangga, dan sebagainya. Dengan mempraktikkan hubungan yang reflektif dalam keluarga, diharapkan akan menciptakan ekosistem yang kondusif untuk tumbuh kembang anak.

Disiplin positif berkaitan dengan bagaimana orang tua bisa menumbuhkan kemandirian anak tanpa hukuman maupun sogokan. Artinya, bukan hanya bertujuan untuk membuat si buah hati menjadi anak yang patuh, tetapi menumbuhkan kesadaran untuk kemudian bisa mengembangkan sikap disiplin pada anak.



Belajar efektif terkait dengan pendidikan keluarga. Dalam proses belajar ini, kita sadar bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, sehingga kuncinya adalah memunculkan keluarga yang kuat dan berdaya. Untuk itu, perlu disepakati bersama bahwa pengasuhan atau *parenting* merupakan urusan bersama; peran kolektif masyarakat dan negara yang membutuhkan proses panjang.

Saat ini Yayasan Keluarga Kita sudah ada di hampir 101 kabupaten/kota dengan jumlah relawan sebanyak lebih dari 3.000 orang. Kami bekerja setiap hari untuk menyebarkan kurikulum tersebut dalam bentuk sesi-sesi. Salah satu sesi yang banyak digunakan adalah sesi menonton bareng. Sesi ini berisi materi dalam bentuk sinetron atau komedi sehingga para orang tua bisa memahami materi dengan cara yang menyenangkan melalui proses belajar dengan saling berbagi dan bercerita. Meskipun terdapat 10% orang tua yang memiliki tingkat kemampuan baca rendah, dengan sesi ini semua orang bisa dengan mudah memahami kurikulum dari Yayasan Keluarga Kita.

Capaian Perilaku Orang Tua

Ketika kita berbicara tentang pendidikan keluarga, tujuan yang harus dicapai tidak sekadar memberikan materi saja, tetapi juga betul-betul mampu mengubah perilaku. Berdasarkan kurikulum yang dibuat, Yayasan Keluarga Kita melakukan riset mengenai capaian perilaku orang tua untuk menjadi acuan keberhasilan program Rangkul di taraf keluarga²⁹.

29 Rangkul. <https://rangkul.keluargakita.com/rangkul/tentang-rangkul/>.

Di level kurikulum yang pertama, hubungan reflektif memiliki tiga indikator, yakni *menyeimbangkan kuantitas dan kualitas waktu bersama keluarga*, dengan hasil 81% yang sesuai harapan, 15% perlu diusahakan lagi, dan 4% yang belum sesuai harapan; *menerapkan teknik komunikasi dalam keluarga*, terdapat 70% sesuai harapan, 20% perlu diusahakan, dan 10% belum sesuai harapan; serta *mengelola emosi diri*, dengan 54% sesuai harapan, 30% perlu diusahakan, dan 16% belum sesuai harapan.

Selanjutnya pada kurikulum yang kedua, disiplin positif, terdapat tiga indikator, yakni *mendorong anak membuat dan menerapkan kesepakatan bersama*, dengan 74% sesuai harapan, 19% perlu diusahakan, dan 7% belum sesuai harapan; *menumbuhkan kemandirian anak*, dengan 74% sesuai harapan, 24% perlu diusahakan, dan 2% belum sesuai harapan; serta *mengenal anak dengan utuh*, dengan 75% sesuai harapan, 22% perlu diusahakan, dan 3% belum sesuai harapan.

Kurikulum yang ketiga, belajar efektif, terdapat indikator *mendorong anak mampu menyelesaikan masalah*, dengan 88% sesuai harapan, 9% perlu diusahakan, dan 3% belum sesuai harapan.

Simpulan yang bisa ditarik berdasarkan data tersebut adalah bahwa terdapat capaian yang cukup berhasil dan ada juga yang menjadi tantangan selanjutnya. Salah satu yang menjadi tantangan besar adalah kemampuan orang tua untuk mengelola emosi. Jadi, tekanan-tekanan yang dialami keluarga, kemampuannya untuk mengenali emosi, hingga mengelolanya untuk kemudian bisa tetap sensitif dan responsif terhadap kebutuhan anak, masih menjadi tantangan besar.



Tantangan dan Hambatan Orang Tua

Berbicara tentang kondisi keluarga di masa pandemi, tantangan utama yang ditemukan adalah persoalan manajemen emosi dan manajemen energi, yakni bagaimana para orang tua bisa memiliki kemampuan mengelola emosinya dengan baik. Menurut Goleman³⁰, kemampuan mengelola emosi merupakan kemampuan individu untuk mengatasi emosinya masing-masing agar terungkap dengan tepat. Individu yang memiliki tingkat kemampuan mengelola emosi yang cukup baik akan cepat bangkit dari keterpurukan, sementara individu yang memiliki tingkat kemampuan mengelola emosi yang rendah akan terus bertarung melawan perasaan yang negatif.

Situasi yang penuh dengan ketidakpastian seperti masa pandemi ini memang membuat emosi dan energi dalam keluarga cenderung naik-turun. Untuk itu perlu dukungan dari segala pihak agar setiap keluarga mampu mengatasinya karena permasalahan ini merupakan urusan bersama. Hal tersebut menjadi tantangan, baik bagi orang tua dan anak, untuk bisa mengatasi hambatan di masa pandemi.

Hambatan umum di hampir semua keluarga yang dihadapi di masa pandemi ini, yaitu yang *pertama*, belajar di rumah menimbulkan perubahan rutinitas ekstrem. Tidak semua keluarga mampu beradaptasi secara utuh dalam proses perubahan ini, sehingga beberapa disiplin rutinitas serta jadwal harian menjadi kacau balau. Padahal, hal ini bisa diatasi dengan membuat struktur atau jadwal harian anak agar memiliki pembiasaan waktu belajar yang baru.

30 Goleman Danie. 1996. *Emotional Intelligence; Kecerdasan Emosional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Kedua, hambatan dalam berinteraksi dengan guru dan sekolah. Orang tua yang sudah memiliki interaksi dengan guru, bisa menjadi lebih mudah ketika harus melakukan komunikasi belajar jarak jauh. Artinya, orang tua bisa mengambil alih sebagian peran guru di rumah dengan baik. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit orang tua, yang selama ini menjadikan sekolah memiliki wewenang penuh dalam pendidikan anak dan melimpahkan tanggung jawabnya ke sekolah, ketika aktivitas belajar dipindah ke rumah, menjadi tantangan bagi orang tua karena harus memfasilitasi proses belajar anak di rumah.

Ketiga, hambatan dalam proses adaptasi teknologi. Isu teknologi memang merupakan isu yang menggambarkan kesenjangan di dalam keluarga dan pendidikan. Isu ketimpangan dalam pendidikan dan keluarga sudah ada sejak puluhan tahun. Namun, dengan adanya pandemi, permasalahan ini menjadi semakin nyata. Anggapan bahwa platform-platform digital bisa menjadi penyelesaian persoalan dunia pendidikan tanpa menganalisis lebih mendalam mengenai karakteristik masyarakat Indonesia, menghadirkan persoalan baru. Tidak sedikit keluarga yang memiliki keterbatasan akses dan jaringan yang mengakibatkan tersendatnya distribusi pengetahuan dan praktik pendidikan semasa pandemi.

Teknologi memudahkan dan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, di sisi lain teknologi membawa isu *digital divide* atau kesenjangan digital yang memperparah kesenjangan anak-anak dalam hak memperoleh akses pendidikan. Hal ini tentu menjadi persoalan yang harus diatasi bersama agar anak



mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan orang tua mampu menjadi pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya.

Simpulan

Yayasan Rangkul Keluarga Kita yang telah berkegiatan sejak tahun 2012 berfokus pada program pemberdayaan dan pendidikan keluarga. Tujuan utamanya, agar orang tua mampu berdaya dan menjadi sumber belajar utama bagi anak dalam berbagai praktik pengasuhan. Cinta menjadi faktor pendorong utama dalam setiap kegiatan dikarenakan—hakikatnya—setiap orang tua memiliki modal cinta yang unik dan berbeda bagi buah hati mereka. Selain itu, Yayasan Rangkul Keluarga Kita juga mengedepankan prinsip *Mencintai dengan Lebih Baik*. Cinta merupakan singkatan dari *Cari Cara, Ingat Impian Tinggi, MeNerima Tanpa Drama, Tidak Takut Salah, dan Asyik Main Bersama*. Yayasan Rangkul Keluarga Kita dalam operasionalnya mengembangkan tiga kurikulum yang terdiri dari *reflektif, disiplin positif, dan belajar efektif*. Karena ketika berbicara mengenai pendidikan keluarga, tujuan utama yang hendak dicapai adalah perubahan sikap dan perilaku anggota keluarga.

Profil Narasumber

“Pendidikan adalah belajar, bergerak, dan bermakna.” Kalimat tersebut rasanya cukup menggambarkan kiprahnya di bidang pendidikan. Ia telah berkecimpung sejak 1998. Menulis tujuh buku yang memotret dunia edukasi di Indonesia. Salah satunya serial tiga buku *Semua Murid Semua Guru*. Dalam buku tersebut, ia mengintegrasikan seluruh aspek kehidupan dengan pendidikan.

Sehingga arah pendidikan menjadi jelas dan dapat sebagai pedoman bagi negara untuk berkembang.

Saat kuliah di Jurusan Psikologi Universitas Indonesia, ia telah menjadikan pendidikan sebagai hal utama dalam visi memajukan negara. Ia memandang semua elemen adalah guru dan semua adalah murid. Menurutnya, untuk mewujudkan semangat tersebut, kita harus selalu mempraktikkan dan berkarya nyata. Dan kiprah Najeela Shihab ini bisa sebagai contoh tentang aktivis pendidikan yang bergerak untuk mendorong perubahan pendidikan demi Indonesia maju.





Ketahanan dan Konseling Keluarga Wonderful Family³¹

Fathayatul Husna³²

Tingkat Perceraian dan Kemunculan Komunitas Wonderful Family

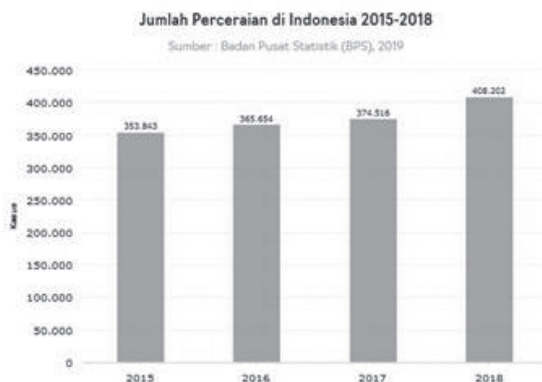
Ketahanan keluarga menjadi tema yang menarik di tengah pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) ini. Pasalnya, setiap anggota masyarakat akan diminta untuk tetap berdiam diri di

31 Tulisan ini dikontribusikan untuk perhelatan gagasan Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru dalam Webinar Sesi 16 Kongres Kebudayaan Desa (KKD), melalui *call for papers*.

32 Alumnus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menetap di Aceh Utara.

rumah dan tetap tinggal bersama keluarga. Setiap anggota keluarga dipastikan untuk melakukan proteksi terbaik guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Hal ini tentu berimbas pada penyesuaian ritme keseharian seluruh masyarakat.

Akibatnya, secara langsung keluarga menjadi faktor dan tangan pertama yang akan mengawasi dan mengerjakan seluruh pekerjaan, baik secara personal atau bersama-sama. Namun, aktivitas di rumah bersama keluarga terkadang tidak berujung pada keharmonisan keluarga. Banyak ditemui kasus perceraian di masa pandemi.



Gambar 1 Jumlah Perceraian di Indonesia 2015-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dikutip oleh katadata.com, 2019³³

Berdasar data di atas, dapat diketahui jika angka perceraian di Indonesia meningkat setiap tahun, terhitung dalam rentang waktu tahun 2015 hingga 2018. Angka perceraian tahun 2015

33 Dwi Hadya Jayani. 2020. "Ramai RUU Ketahanan Keluarga, Berapa Angka Perceraian Di Indonesia?". [https:// databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan -keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/20/ramai-ruu-ketahanan-keluarga-berapa-angka-perceraian-di-indonesia).



menunjukkan 353.843 pasangan yang telah bercerai, 365.654 pasangan di tahun 2016, sebanyak 374.516 pasangan di tahun 2017, dan di tahun 2018 angka perceraian mencapai 408.202 pasangan. Angka ini memaksa semua orang untuk melihat kasus perceraian di Indonesia secara khusus dan serius. Umumnya penyebab terjadi perceraian dikarenakan adanya perselisihan yang dilakukan secara terus-menerus dalam keluarga. Selain itu, faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga berpengaruh pada terjadinya perceraian. Kasus seperti ini juga didasarkan oleh sejumlah keadaan, misalnya, dominasi pekerjaan hanya pada satu pihak, saling menyalahkan, dan sebagainya.

Sejak pandemi Covid-19, kasus perceraian—tidak hanya di Indonesia—meningkat tajam, salah satunya adalah di Cina.³⁴ Proses perceraian ini dikabarkan karena intensitas pertemuan pasangan yang tinggi setiap harinya, nyaris 24 jam. Untuk menjawab dan mengatasi problem ini, diperlukan pengawasan berdasarkan payung hukum pemerintah dan didorong dengan berdirinya komunitas-komunitas yang fokus pada ketahanan keluarga harmonis, salah satunya komunitas yang bergerak di bidang praktik konseling keluarga.

Wonderful Family merupakan salah satu komunitas yang berkecimpung di bidang konseling keluarga dengan menggunakan sistem *online* dan juga *offline*. Wonderful Family dinilai menjadi terobosan karena aktif dalam menawarkan layanan dan edukasi keluarga berbasis digital. Komunitas ini didirikan oleh Cahyadi Takariawan yang disapa hangat dengan sebutan Pak Cah.

34 Lynda Hasibuan. 2020. "Kisah Sendu Corona: Banyak". <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200423111651-33-153867/kisah-sendu-corona-banyak-pasangan-cerai-akibat-karantina>.

Keprihatinan Cahyadi terhadap tingginya kasus perceraian dari tahun ke tahun mendorongnya untuk menyediakan kelas khusus konsultasi keluarga. Cahyadi kemudian menyusun rangkaian materi tentang keluarga harmonis sebagai bahan ajaran untuk dibagikan kepada masyarakat. Selain itu, berbagai inisiatif yang datang dari berbagai lapisan masyarakat, ditampung Cahyadi beserta istri untuk kemudian bekerja sama dengan sejumlah tim guna membangun dan memperkuat komunitas. Sejauh ini, Cahyadi beserta istrinya telah menerbitkan sejumlah buku yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, seperti *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami* dan *Wonderful Family*.

Tulisan ini merupakan sebuah laporan penelitian yang ditulis dalam bentuk deskriptif kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara *virtual etnografi* atau dikenal dengan istilah *netnografi*. Penulis mengamati dan menganalisis unggahan Cahyadi Takariawan dan tim Wonderful Family di *website* <https://pakcah.id> dan media sosial Instagram: *@cahyadi_takariawan* dan *@wonderfulfamilyintitute*. Data yang diperoleh kemudian juga dianalisis dari sudut pandang hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga.

Wonderful Family: Alternatif dalam Membangun Ketahanan Keluarga

Wonderful Family lahir sebagai komunitas konseling keluarga untuk menjawab dan mengatasi permasalahan meningkatnya angka perceraian di Indonesia.³⁵ Didirikan oleh sepasang suami-istri,

35 Tyo Fernanda. 2020. Konseling Keluarga Islami Online Wonderful Family. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*. 5(1): 14–24.



Cahyadi Takariawan dan Ida Nurlaila, *Wonderful Family* berhasil mempublikasikan praktik keluarga harmonis ke berbagai penjuru daerah di Indonesia, bahkan hingga lingkup internasional.

Meskipun, tidak didukung dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan profesinya—Cahyadi Takariawan menempuh pendidikan di bidang Farmasi dan telah menyelesaikan profesi apoteker di Universitas Gadjah Mada—Cahyadi Takariawan beserta istri, Ida Nur Laila, sangat mendalami peran mereka sebagai konselor keluarga. Hal ini dapat dilihat dari prestasi yang telah mereka peroleh melalui terbitnya 47 judul buku. Di antaranya 47 judul buku tersebut, terdapat enam judul buku yang hingga saat ini *best seller*, yaitu: *Wonderful Husband*, *Wonderful Wife*, *Wonderful Marriage*, *Wonderful Journey*, *Wonderful Couple*, dan *Wonderful Family*. Prestasi ini juga mengantarkan Cahyadi Takariawan beserta timnya mengembangkan visi dan misi mereka di bidang konseling keluarga.

Tahun 1997, Cahyadi Takariawan memublikasikan tulisan pertamanya berjudul *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami*. Tanpa disangka buku ini menuai respons positif dari publik. Cahyadi Takariawan yang sering disapa dengan sebutan Pak Cah mendapat banyak tawaran dari berbagai pihak untuk menyampaikan materi terkait bidang keluarga, khususnya mengupas tuntas mengenai keluarga harmonis.³⁶ Cahyadi Takariawan kerap menyampaikan materi ini di setiap seminar-seminar di berbagai kampus dan lembaga untuk mengedukasi masyarakat terkait menjadikan keluarga harmonis.

36 Fernanda, "Konseling Keluarga Islami Online Wonderful Family."

Cahyadi Takariawan kemudian menginisiasi sebuah forum komunitas untuk konsultasi keluarga. Komunitas ini dibentuk untuk memberikan layanan kepada pihak masyarakat yang sedang mengalami ketimpangan dalam keluarga. Forum ini dirancang sebaik mungkin dengan menghadirkan sejumlah materi edukasi keluarga harmonis dengan memanfaatkan berbagai media. Komunitas ini diberi nama Jogja Family Center. Nama komunitas kemudian diganti menjadi *Wonderful Family*. Pembaharuan juga meliputi materi-materi terkait keluarga dan sosialisasinya. Misalnya, dengan didirikan Sekolah Calon Ayah dan Sekolah Calon Ibu. Selain itu, Cahyadi Takariawan juga aktif membentuk grup *online* di sejumlah sosial media untuk melakukan konsultasi langsung kepada setiap keluarga masyarakat. Sebanyak 4010 anggota telah mengikuti kelas pranikah, kelas pascanikah, dan program lainnya. Hal ini dilakukan oleh Cahyadi Takariawan agar terciptanya keluarga penuh takwa menuju surga.

Konsep Keluarga Harmonis Versi *Wonderful Family*

Secara umum, keluarga menjadi faktor penentu utama terbentuknya karakter. Apabila keluarga menerapkan nilai kebaikan maka akan baik pula generasinya, begitu pun sebaliknya. Jika nilai-nilai keburukan yang melandasi sebuah keluarga maka generasi selanjutnya akan meniru dan mewarisi nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk dapat membentuk serta mendidik para generasinya agar ia dapat



melakukan praktik sosial yang baik.³⁷ Berbagai kebijakan terkait, juga telah dibentuk dan disosialisasikan.

Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan sebagai aturan *penasihatatan* serta pembinaan perkawinan.³⁸ Aturan ini menyebutkan bahwa kehidupan rumah tangga dan permasalahan yang harus diwaspadai antara lain terkait sisi ekonomi, perselingkuhan, dan keharmonisan.³⁹ Cahyadi Takariawan menilai sisi ekonomi adalah bagian krusial yang sering dijadikan alasan dalam pertikaian rumah tangga. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, anggota keluarga dapat secara bersama-sama mengatur keuangan keluarga. Diperlukan keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dana.

Wonderful Family mencoba untuk memberikan solusi dalam mengatasi ketimpangan dan persoalan lain yang terjadi di lingkungan keluarga. Wonderful Family mengedepankan konsep keagamaan, kompilasi dengan keilmuan keluarga, dan pendekatan komunikasi.⁴⁰ Ketiga komponen ini menjadi pertimbangan kuat untuk membangun keluarga yang harmonis.

Wonderful Family mengutamakan penguatan agama dalam keluarga dan menjadi faktor terpenting untuk mendulang aktivitas positif dalam rumah tangga. Hal ini dinilai penting guna membangun keluarga yang harmonis dan islami. Konsep keagamaan ini

37 Lutfi Amalia. 2020. Penilaian Ketahanan Keluarga terhadap Keluarga Generasi Millennial di Era Globalisasi sebagai Salah Satu Fondasi Ketahanan Nasional. *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*. 5 (2): 160.

38 Abdul Jamil and Fakhruddin. 2015. Isu dan Realitas di Balik Tingginya Angka Cerai-Gugat di Indramayu. *Jurnal Harmoni*. 14 (2): 140.

39 Sri Rahayu and Rasyidah. 2019. Perilaku Menyimpang dalam Pernikahan (Studi Kasus Perselingkuhan pada Masyarakat Kampong Kota Lintang Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 4 (2).

40 Fernanda. "Konseling Keluarga Islami Online Wonderful Family."

dinilai bagaimana seseorang dalam sebuah rumah tangga mampu memberikan energi spiritual kepada anggota-anggotanya untuk menyandarkan setiap permasalahan hanya kepada Allah *subhanahu wata'ala*.⁴¹ Ajakan ini mampu mendorong terbentuknya energi positif yang akan melahirkan keluarga sakinah, mawadah, *warahmah*. Cahyadi Takariawan menjelaskan, Islam menjadi fondasi penting dalam rumah tangga dan akan membawa pada keutuhan dan ketahanan keluarga.

Selanjutnya, kompilasi keilmuan di bidang keluarga. Cahyadi Takariawan beserta tim Wonderful Family menilai jika komunikasi menjadi acuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini dapat mengukur kesetiaan dengan pasangan, kerja sama yang dibangun, dan sebagainya. Pendekatan komunikasi juga menjadi langkah akhir dalam penguatan ketahanan keluarga. Pola komunikasi yang buruk akan membawa dampak tidak sehat pada rumah tangga. Oleh karena itu, pola komunikasi perlu diperhatikan sebaik mungkin dalam membangun keluarga yang harmonis, serta dalam mendidik anak-anak.⁴² Agama tidak berdiri sendiri, tetapi didukung kuat dengan pola komunikasi dan sikap saling menghargai yang kuat.⁴³

Cahyadi Takariawan menjelaskan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga, membutuhkan perhatian, tanggung jawab, rasa hormat, dan pengetahuan.⁴⁴ Terkait

41 Enung Asmaya. 2012. Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. 6(1): 5.

42 Yuni Retnowati. 2008. Pola Komunikasi Orang Tua Tunggal dalam Membentuk Kemandirian Anak (Kasus di Kota Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 6(1): 202.

43 Damayanti Wardyaningrum. 2013. Komunikasi untuk Penyelesaian Konflik dalam Keluarga: Orientasi Percakapan dan Orientasi Kepatuhan. *Jurnal Al-Azhar Indonesia: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. 2(1): 48.

44 Cahyadi Takariawan. 2020. "Empat Unsur Cinta Kamu." accessed May 12, 2020, <https://pakcah.id/empat-unsur-cinta-kamu>.



perhatian, Cahyadi menerangkan bahwa perhatian yang secara aktif disampaikan kepada pasangan akan sangat membantu menjaga keserasian dalam rumah tangga. Hal ini tentunya akan mendorong terbentuk keluarga yang rukun dan harmonis.

Cahyadi juga menjelaskan bahwa pasangan dalam rumah tangga saling bertanggung jawab untuk menciptakan suasana bahagia, rela berkorban sepenuh hati demi pasangan dan keluarga. Sedangkan terkait rasa hormat, Cahyadi menjelaskan bahwa secara pribadi setiap pasangan mampu menyadari kepribadian pasangan, menghormati setiap perbedaan yang hadir dalam keluarga. Sebuah keluarga juga harus dibekali berbagai bidang keilmuan, terutama ilmu keluarga: mengatur emosi, mengenali karakter dan kepribadian, serta mengenali perubahan yang mungkin terjadi. Ilmu tentang rumah tangga.

Wonderful Family memupuk agama, ilmu, dan komunikasi menjadi tiga pilar penting yang harus dipupuk dalam membangun rumah tangga. Wonderful Family melalui akun Instagram @ *wonderfulfamilyinstitute* juga menyampaikan aneka tips lainnya untuk menjaga ketahanan keluarga. Misalnya, mengunggah *postingan* yang bertuliskan, “Saling Memahami, Bukan Saling Menuntut.”⁴⁵

Wonderful Family juga aktif mengampanyekan praktik-praktik yang harus dilakukan untuk menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga. Konsep ini mendukung terbentuknya keluarga yang harmonis. Salah satu caranya adalah dengan menulis artikel tentang kiat-kita hidup harmoni di laman *website*. Misalnya, artikel berjudul

45 Cahyadi Takariawan. 2019. “No Title”. https://www.instagram.com/wonderful_family_institute/.

“Mengapa Pasangan Suami Istri Sangat Sering Menelepon?”. Dalam tajuk ini Cahyadi Takariawan mengulas terkait pentingnya komunikasi.

Konsep Keluarga Wonderful Family dan Hukum Keluarga

Ditinjau melalui jendela hukum, khususnya hukum keluarga Islam, pembahasan mengenai keluarga, rumah tangga, dan perkawinan telah diatur secara detail serta rapi dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah disampaikan bahwa salah satu syarat terbentuknya keluarga harmonis adalah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan harus sekufu (sesuai pertimbangan pilihan jiwa, agama, dan akhlak).⁴⁶

Secara umum, sekufu diartikan sebagai seimbang, serasi, dan sepadan pada suatu calon pasangan. Jika telah ditemukan titik sekufu maka perkawinan dapat dilakukan secara sah. Hal ini berarti pihak laki-laki memiliki kesamaan, kesepadanan, dan sebanding dengan calon istri pilihannya. Begitu pula pada wanita yang menilai calon suaminya juga memiliki keserasian dengannya. Keserasian ini akan menjadi unsur penting terjalannya keluarga yang harmonis.⁴⁷

Dalam pandangan Islam, yang dimaksud sekufu tentu dilihat berdasarkan akhlak serta ibadahnya.⁴⁸ Kedua poin ini menjadi penting mengingat membangun keluarga sakinah, mawadah,

46 Asrizal Saiin. 2018. Efektivitas Kafa'ah Membentuk Rumah Tangga Harmonis Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Equitable*. 3(1): 26.

47 Cahyadi Takariawan. 2016. Wonderful Family Journeys for a Marriage. Solo: Era Adicitra Intermedia.

48 Saiin, "Efektivitas Kafa'ah Membentuk Rumah Tangga Harmonis Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974."



warahmah memerlukan kaidah-kaidah keislaman. Seperti yang telah dijelaskan oleh Cahyadi Takariawan bahwa konsep Wonderful Family sangat mengutamakan pengaplikasian nilai-nilai agama Islam dalam membangun rumah tangga dan keluarga harmonis. Hal ini didasari karena semua tindakan dan aktivitas yang dilakukan dalam rumah tangga bernilai ibadah dan hanya ditujukan kepada Allah *subhanahu wata'ala*.

Di samping itu, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1, menjelaskan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan dilakukan harus sah berdasarkan hukum negara dan hukum yang sesuai dengan keyakinan pasangan. Praktik perkawinan juga akan dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Tertulis dalam asas-asas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Poin b, bahwa:

“Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya

dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, surat akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.”

Di samping itu, berkenaan dengan membangun rumah tangga yang harmonis, dalam asas-asas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk membangun rumah tangga tentunya sebanding dengan membangun kebahagiaan. Artinya, sejak memutuskan untuk melakukan perkawinan, pasangan suami istri saling bersinergi dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang bahagia. Tidak hanya sekadar bahagia, pasangan suami istri berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kekekalan atau keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, pekerjaan rumah tangga tidak hanya didominasi oleh satu pihak tertentu. Suami istri saling melengkapi satu sama lain.

Cahyadi Takariawan mengemas pesan terkait perkawinan melalui *website* <http://pakcah.id> dengan judul “Menuju Bersatunya Cinta, dalam Bingkai Ridha-Nya”. Cahyadi menyampaikan bahwa kesamaan visi dan misi perlu dipertimbangkan saat calon suami istri akan melangsungkan pernikahan. Selain itu, ia juga menyampaikan pentingnya untuk memunculkan perasaan yang sama, merasakan kemantapan hati, dan sudah tidak ada keraguan.⁴⁹ Hal ini juga didukung dalam asas-asas atau prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Poin d, bahwa:

49 Cahyadi Takariawan. 2019. “Menuju Bersatunya Cinta, Dalam Bingkai RidhaNya.” <https://pakcah.id/menju-bersatunya-cinta-dalam>.



“Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.”

Asas ini juga didukung dengan poin selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Poin e, yang menjelaskan bahwa:

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.”

Berdasarkan penjelasan ini, dapat diketahui bahwa saat akan membangun rumah tangga, lebih diutamakan untuk memperhatikan dari segi kematangan seseorang, tidak sekadar mengetahui peran-perannya dalam keluarga. Usia di bawah umur dikategorikan sebagai usia yang rentan. Dikhawatirkan, sikap dan emosi masih belum stabil. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menetapkan batas umum kawin bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun. Dengan adanya aturan ini tentunya untuk meminimalkan terjadinya perceraian dan kegoyahan rumah tangga. Disampaikan juga bahwa perkawinan sebaiknya tidak diakhiri dengan perceraian. Negara sangat melindungi perkawinan

secara sah, tetapi sedikit memperlambat praktik perceraian. Sebelum sebuah pasangan suami istri mengajukan diri untuk berpisah atau bercerai maka ia akan dihadapkan dengan sejumlah pertanyaan dan disertakan dengan alasan-alasan yang kuat.

Dalam agama Islam, anak yang dididik sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan dengan pola didikan yang baik, amalannya tidak akan terputus. Artinya, suami istri harus mendidik anak-anaknya dengan sangat baik dan mendekatkan anak-anak pada ajaran Islam serta menanamkan nilai-nilai kebaikan pada dirinya. Dalam hal mendidik anak, Cahyadi Takariawan menjelaskan bahwa mendidik anak tidak hanya sebatas penyampaian materi, tetapi juga harus memiliki visi dan misi untuk membawa karakter anak mendekati nilai-nilai islami.⁵⁰ Ia juga menjelaskan kebersamaan dalam keluarga sangat diperlukan untuk membangun tim yang solid.

Profil Penulis

Fathayatul Husna merupakan alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan magister pada Jurusan Interdisciplinary Islamic Studies. Aktif menulis artikel ilmiah dan terlibat dalam berbagai penelitian. Pernah mengikuti program pemberdayaan masyarakat bersama para dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, “Jurnalistik ramah anak”. Saat ini menjadi tenaga pengajar honorer di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

50 Cahyadi Takariawan. 2019. “Anak Anda, Akan Sekolah di Mana?”. <https://pakcah.id/anak-anda-akan-sekolah>.





Pengasuhan Gotong Royong ala Ledokombo: Belajar dari Kearifan Keluarga Desa⁵¹

Farha Ciciek⁵², Suporahardjo⁵³, Sisillia Velayati⁵⁴

“Jangan pernah ragu bahwa adanya sekelompok kecil warga negara yang berkomitmen tinggi. Mereka dapat mengubah dunia.” (C. Otto Scharmer)

-
- 51 Tulisan ini dikontribusikan untuk perhelatan gagasan Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru dalam Webinar Sesi 16 Kongres Kebudayaan Desa (KKD), melalui *call for papers*.
 - 52 Farha Abdul Kadir Assegaf alumnus studi Teologi dan Filsafat di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga dan Master Sosiologi di Universitas Gadjah Mada. Menempuh pendidikan *non-degree* di Australian National University (2005). Menjadi Ketua Tanoker Ledokombo dan aktif melakukan pendampingan dan pendidikan masyarakat.
 - 53 Dr. Ir. Suporahardjo lahir di Jember 9 Juli 1963. Pernah belajar di Fakultas Kehutanan UGM (S-1) dan melanjutkan pendidikan S-2, S-3 di Sosiologi UI. Saat ini tinggal di kampung sebagai pegiat Komunitas Belajar Tanoker, Ledokombo, Jember.
 - 54 Alumnus Sosiologi, Universitas Brawijaya. Pengurus Yayasan Tanoker serta aktif melakukan pendampingan masyarakat.

Satu dekade yang lampau, Kecamatan Ledokombo yang luasnya 146,92 km² dan didiami oleh sekitar 64.841 warga⁵⁵, belum apa-apa. Namun, berkat tangan dingin sekelompok kecil masyarakat, khususnya anak-anak desa itu, banyak berita gembira dan perubahan baik terjadi di wilayah sejuk di kaki Gunung Raung ini. Pendidikan yang mencerahkan menjadi kunci perubahan itu.

Proses pendidikan yang dilakukan dengan kegembiraan, dengan modal sosial *kegembiraan yang kritis*, tuah anak-anak memengaruhi orang-orang dewasa di desa tersebut. Baik keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, hingga sektor-sektor usaha, mendukung mereka untuk terus bergerak maju. Bermain yang tidak main adalah rohnya. Sebab bermain, mencerdaskan.

Masih lekat dalam ingatan masyarakat Ledokombo terhadap cap terbelakang yang dilekatkan pada wilayah dan masyarakat mereka. Memang tak bisa dimungkiri, marginalisasi multiaspek: sosial, ekonomi, budaya, dan politik, telah selama puluhan tahun. Tidak banyak pihak yang memberikan perhatian terhadap Ledokombo. Masyarakatnya rata-rata hidup dengan kondisi yang kurang layak, terutama jika diukur menggunakan kaidah kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mata pencaharian penduduk umumnya buruh tani dan lainnya sebagai buruh rupa-rupa hingga pekerja serabutan. Sebagian kecil berprofesi pedagang kecil, pegawai negeri, dan swasta. Empat dekade terakhir, sebagian warga Ledokombo terutama perempuan mulai

55 Badan Pusat Statistik, 2017.



bekerja di luar desa mereka bahkan hingga keluar negeri (Velayati, 2018).⁵⁶

Akibat migrasi ini, anak-anak pekerja migran (APM) mengalami masalah berlapis dalam keseharian. Mereka bisa disebut sebagai yatim piatu sosial atau *children left behind* (UNESCO): memiliki orang tua, tetapi hidup tanpa kebersamaan dan kasih sayang serta perhatian memadai dari orang tua dan lingkungan. Ketika salah satu atau kedua orang tua mereka bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan, pengasuhan dilimpahkan kepada kerabat terdekat bahkan tetangga tanpa adanya persiapan yang matang. Anak-anak sering mendapat pengasuhan yang tidak layak.⁵⁷ Selain itu, tidak jarang mendapat hinaan, ejekan, dan pengucilan dari lingkungan sekitar karena anggapan APM adalah anak nakal dan tidak bisa diatur.

56 Berdasarkan penelitian Komunitas Tanoker (2014) sebagian besar buruh migran meninggalkan kampung halamannya (desanya) karena mengalami tragedi kehidupan. Beberapa faktor yang memengaruhi warga desa menjadi buruh migran: pertama, ingin terbebas dari tragedi kehidupan keluarga yang penuh penderitaan (kebanyakan KDRT); kedua, respons kegagalan desa yang tidak dapat menyediakan sumber ekonomi yang cukup; dan ketiga, semacam protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa tidak memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi kehidupan warganya. Tampak bahwa warga desa yang berangkat menjadi buruh migran ini karena nasib hidupnya mengalami kemerosotan kompleks, baik yang terjadi di internal dalam keluarganya maupun eksternal di lingkungan desanya. Dalam 5 tahun terakhir tren migrasi ke luar negeri yang dilakukan oleh kebanyakan perempuan di Ledokombo akhir-akhir ini mulai bergeser ke migrasi di dalam negeri yang dilakukan laki-laki. Sebagian besar dari mereka bekerja di bidang konstruksi bangunan di Bali.

57 Pertama, pengasuh pengganti yang mendapat titipan anak buruh migran kurang mampu mengelola dana yang dititipkan orang tua anak kepada mereka untuk biaya pengasuhan anak yang dititipkan. Mereka, misalnya, malah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi daripada untuk membiayai pendidikan anak yang mereka asuh. Kedua, adanya pamanjaan wali mereka. Misalnya, adanya kecenderungan nenek dan kakek untuk memanjakan cucunya dengan cara memberikan apa pun yang diminta karena ketersediaan uang kiriman orang tua. Ketiga, ada anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, dan bahkan kekerasan seksual.

Meskipun APM menjadi kelompok anak yang paling rentan, tidak berarti anak-anak lain bebas masalah. Sebagai anak desa marginal mereka merasakan dampak dari “mutilasi hak-haknya”. Hal tersebut diperburuk oleh situasi kurangnya pengawasan dan wawasan tepat guna orang tua atau wali terhadap hak anak. Berbagai aktivitas sekolah dan di luar sekolah berdampak pada masalah-masalah yang dihadapi anak-anak, seperti malas belajar, suka membolos, putus sekolah, kehamilan di luar nikah, pernikahan dini, gemar mencuri, konsumsi miras dan obat-obatan terlarang bahkan menjadi pengedar dan adiksi gadget, hingga kecanduan konsumsi makanan dan minuman yang tidak sehat.

Selain itu, juga tidak sedikit anak-anak desa yang tidak memiliki dokumen kependudukan berupa akta kelahiran. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang prosedur pencatatan⁵⁸. Meski demikian, tidak semua anak terjerat dalam situasi tersebut. Sebagian kecil dari mereka justru menjadi motor penggerak perubahan, *creative minority*.

Sekelompok kecil orang, yang terdiri dari anak-anak, beberapa pendamping, dan relawan kemudian membentuk Komunitas Tanoker, yang berarti kepompong dalam bahasa Madura. Komunitas ini memiliki semboyan, “*Bermain, belajar, bergembira, bersahabat dan berkarya*”. Melalui berbagai terobosan budaya, dalam 10 tahun terakhir anak-anak di komunitas telah mendorong banyak perubahan desa. Memandu Desa Ledokombo yang pasif menjadi wilayah yang *bergerak* menjadi desa dunia.

58 Sisillia Velayati, dari Kader ke Leader, Menyemai Inklusi Sosial, TAF Program Peduli, 2018.



Tidak banyak yang menyangka bahwa justru dari anak-anaklah berkembang optimisme dan gairah baru dari desa. Mereka menggapai masa depan yang lebih bermakna bagi masyarakat secara keseluruhan melalui egrang sebagai media. Egrang, sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya, sesuatu yang telah mati suri dalam kehidupan Ledokombo, berhasil dihidupkan dan dirayakan untuk menjadi masa kini dan masa depan.

Permainan egrang menjadi alat perubahan sosial. Anak-anak secara gradual memodifikasi permainan egrang yang dipadukan dengan perkusi dan gerak tari menjadi hasil kreasi seni yang khas yang inovatif, tarian egrang. Tarian egrang telah membuat anak-anak dari desa-desa di Kecamatan Ledokombo dipercaya menjadi utusan untuk kegiatan budaya tingkat lokal, nasional, dan internasional. Mereka juga menjadi juara pemuda/pemudi pelopor seni budaya, masuk dalam finalis Mattel International Competition, finalis Young Kick Andi Heroes dan lolos menjadi kontingen Jatim dalam Indonesia Mencari Bakat II, dan berbagai prestasi lainnya.

Tahun 2010 lahir inspirasi Festival Egrang yang akhirnya mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI untuk hajatan budaya tahunan desa. Tahun 2017, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Yohana Yambise, mengunjungi Festival Egrang dan dalam lawatannya mendorong menjadi kabupaten layak anak. Di arena festival dan hajatan rakyat desa, komitmen untuk pemenuhan hak anak secara politik ekonomi dan budaya ditandakan oleh negara. Setahun kemudian dengan semangat kebersamaan berbagai pihak, kerja sama lintas sektoral pemerintah

dan masyarakat Jember, Kecamatan Ledokombo mengukuhkan diri menjadi KELANA (kecamatan layak anak dengan penerbitan SK Forum Anak Kecamatan Ledokombo No:188/04/35.09.28/2020) dan Desa Ledokombo merupakan desa pertama di kecamatan berkomitmen menjadi DELANA (desa layak anak). Tidak hanya melalui permainan egrang, Ledokombo juga menerapkan pola pengasuhan gotong royong melalui konsep sekolah informal bagi warga yang mengemban tanggung jawab sebagai orang tua bagi anak-anak.

Anakku, Anakmu, Anak Kita–Cucumu, Cucuku, Cucu Kita Bersama

Bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, warga desa terus mendorong gerakan bersama yang dinamakan Pengasuhan Gotong Royong (*collaborative parenting*). Pengasuhan ini terdiri atas dua pilar. *Pertama*, pendampingan anak yang dilakukan secara rutin setiap harinya⁵⁹ yang diperkuat dengan *Sekolah Bok-ebok* (sekolah ibu), *Sekolah Pak-bapak* (sekolah bapak), dan *Sekolah Eyang*. *Kedua*, peran pemerintah sebagai orang tua. Pilar kedua ini mewujudkan, di antaranya dengan dibentuknya KELANA (kecamatan layak anak)

59 Pendekatan sosial budaya dalam situasi bermain yang menyenangkan, *playing is a learning for a better living*. Ini merupakan kegiatan pendampingan anak dengan metode *peer education* (saling belajar dari dan oleh teman sebaya). Berbagai kegiatan dilakukan, yaitu belajar dari alam, baca dan tulis, berhitung, pembuatan kerajinan tangan, *outbond* kepemimpinan, *team building* (melalui pengembangan permainan tradisional), kesenian (tari, musik, menyanyi yang dikolaborasikan dengan permainan tradisional terwujud dalam tarian egrang dan *drum band* egrang), olahraga, kesehatan reproduksi dan memberi ruang besar untuk berbagai inisiatif kreatif. Dari sinilah kemudian tertanam kepedulian bersama terhadap anak-anak, di mana semua elemen masyarakat menjadi orang tua semua anak.



yang mengukuhkan forum anak Kecamatan Ledokombo. Hal ini dinilai membuka ruang partisipasi aktif bagi anak dan perempuan berbagai peran sosial, selain pengalokasian anggaran dana desa dan kecamatan untuk pemberdayaan perempuan dan anak.⁶⁰

Pengasuhan gotong royong kemudian diperkuat dengan kegiatan pembelajaran orang dewasa, terutama orang tua. Dirintis dengan sekolah para ibu atau disebut Sekolah Bok-ebok sejak tahun 2014. Sekolah Bok-ebok telah menghasilkan modul “Pengasuhan Gotong Royong, Pembelajaran dari Ledokombo” yang ditulis oleh alumni.⁶¹ Anggota Sekolah Bok-ebok merupakan komunitas akar rumput yang sebagian besar terdiri atas keluarga pekerja migran dan komunitas pengajian di kampung yang tersebar di berbagai desa di Kecamatan Ledokombo.

Sekolah yang awalnya ditujukan untuk pengenalan pola pengasuhan anak, berkembang menjadi pola pengasuhan komunitas dengan slogan, “Anakku, Anakmu, Anak Kita”. Materinya pun melebar menjadi arena pembelajaran kritis bagi ibu-ibu untuk meraih haknya sebagai perempuan, warga negara, di samping pemenuhan aspek spiritual dan kecakapan kewirausahaan sosial.

Dampak positif Sekolah Bok-ebok bagi keluarga terlihat dari praktik komunikasi dalam keluarga hingga memunculkan inisiatif

60 Diawali tahun 2016 dan diterbitkannya Peraturan Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota Keluarganya Asal Desa Sumbersalak.

61 Berbagai materi yang ada antara lain: pengasuhan bersama, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan dan perlindungan hak anak dan perempuan, kesehatan reproduksi, pola hidup sehat termasuk pola konsumsi sehat, membangun keluarga damai, migrasi aman dan benar, internet cerdas, peran perempuan pembangunan dan keamanan, seks dan gender, deteksi dini radikalisme, serta materi lainnya yang dibutuhkan (Velayati dalam Munggoro, Maemunah, dan Kismadi, 2018, p. 30).

untuk membentuk kegiatan Sekolah Pak-bapak (sekolah bapak-bapak). Apalagi di Ledokombo tidak sedikit suami yang ditinggal istri ke luar kota dan luar negeri disebabkan tuntutan ekonomi. Laki-laki ini kemudian tidak siap secara psikologis untuk mengasuh anak dan mengelola keluarga. Mereka membutuhkan ilmu dan dukungan komunitas untuk pengasuhan anak. Hal ini diperkuat dengan keprihatinan terhadap perkembangan perilaku anak dan remaja di lingkungan Ledokombo. Keterlibatan ayah dan suami dalam pendidikan anak merupakan hal positif untuk harmoni keluarga dan kebahagiaan anak-anak.

Dalam konteks Ledokombo, kehadiran dua sekolah pengasuhan ini dirasakan masih kurang mencukupi kebutuhan pengasuhan. Hal tersebut disebabkan tidak sedikit eyang (kakek dan nenek) yang juga menjalankan fungsi sebagai pengasuh para cucu. Kombinasi antara kebutuhan akan pengetahuan pengasuhan dan pentingnya dukungan terhadap kebutuhan sebagai lansia, menggerakkan beberapa pegiat Karangwreda Bungur (organisasi lansia di Desa Sumberlesung) untuk mendirikan sekolah eyang yang dinamakan Sekolah Yang-eyang Segar.

Awalnya tujuan utama forum lansia ini lebih berfokus kepada pola pengasuhan cucu yang lebih baik. Namun dalam perkembangannya, minat belajar para eyang semakin meluas dan bervariasi, termasuk keinginan para lansia belajar dan berpartisipasi dalam musrenbang. Pendekatan yang digunakan untuk Sekolah Yang-eyang melalui aktivitas senam, pengajian, pembelajaran di kelas, dan *soft skill*.



Dalam waktu 2 tahun sejak kehadirannya, sekolah Yang-eyang telah menunjukkan bukti keberhasilan, misalnya kehadiran kuliner Sekolah Yang-eyang yang unik, enak, dan sehat yang diakui bahkan hingga tingkatan pemerintah daerah Jember, Jawa Timur. Tim kuliner Sekolah Yang-eyang telah dipercaya menjadi delegasi Kabupaten Jember di berbagai perlombaan.

Profil Penulis

Farha Abdul Kadir Assegaf dilahirkan di Ambon, 26 Juni 1963. Alumnus Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga. Menyelesaikan program pascasarjana di Jurusan Sosiologi Universitas Gadjah Mada dan menempuh pendidikan *non-degree* di Australian National University. Terlibat dalam gerakan perempuan dan anak, aktivitas lintas agama, dan pendampingan masyarakat. Fasilitator gender, isu-isu pendidikan, dan sosial keagamaan. Ketua Tanoker Ledokombo dan aktif melakukan pendampingan serta pendidikan masyarakat desa dengan perhatian khusus terkait pendidikan maupun pengembangan kapasitas kepemimpinan dan kewirausahaan sosial anak, perempuan, dan lansia.

Dr. Ir. Suporahardjo dilahirkan di Jember, 9 Juli 1963. Alumnus Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Menempuh pendidikan pascasarjana dan doktoral di Universitas Indonesia, Jurusan Sosiologi. Saat ini tinggal di kampung sebagai pegiat Komunitas Belajar Tanoker, Ledokombo Jember.

Sisillia Velayati dilahirkan di Jember, 6 Maret 1989. Alumnus Universitas Brawijaya, Jurusan Sosiologi. Sejak 2010 melakukan

pendampingan masyarakat di Jember dan Malang yang bergerak di isu perdamaian, perlindungan anak, dan perempuan. Juga terlibat dalam penelitian serta penulisan terkait isu gender dan pekerja migran Indonesia. Pengurus Yayasan Tanoker yang juga aktif melakukan pendampingan kader masyarakat, kewirausahaan, kampung wisata perdamaian dan pengasuhan gotong-royong di Tanoker Ledokombo.





Epilog

Kongres Kebudayaan Desa

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A:

Arah Tataan Indonesia Baru dari Desa

Ryan Sugiarto

(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,

Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)

Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi

Tepat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusdalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggunharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer, mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19.

Ruangan ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggungharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa Panggungharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggungharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggungharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Laporan dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, *pasar.desa.id* menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya. Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.



Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengungus gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

Memahami Situasi di Tengah Pandemi

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.

Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk



memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu) dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjot maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19⁶².

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan. Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepihnya aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja

62 Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam Majalah Basis, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.

warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan, pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyeramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK⁶³.

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun⁶⁴.

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli

63 Wibowo, A. Setyo. 2020. Ibid. Lihat pula <http://www/cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.

64 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.



makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggung pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tanggung karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan

berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.

Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya. Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia



untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkin manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?

Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan. Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.

Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku

The End of Ideology (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.

Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaannya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesadaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesadaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabat tangan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *ruhiah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran,



“Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”

Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.

Kongres Kebudayaan Desa

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa, para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.



Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.

Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujudkan. Istilah *kongres* yang selama ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-

organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah sengkabut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia ataukah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.

Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi sosok ibu yang *nuturing, ngopeni, ngrumat, ngemonah, nggulowentah, murakabi* semua anggota keluarga.



Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa*, *para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem

kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”⁶⁵

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model

65 Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.



kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.

Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga, dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.

Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat,

aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20 tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi

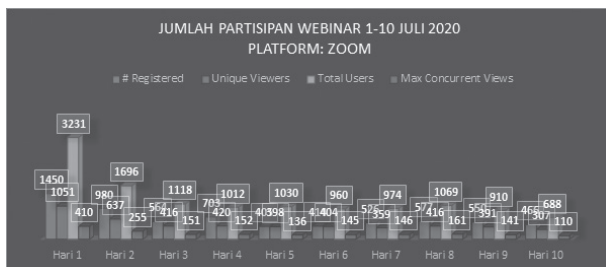


(Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.

Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipan webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

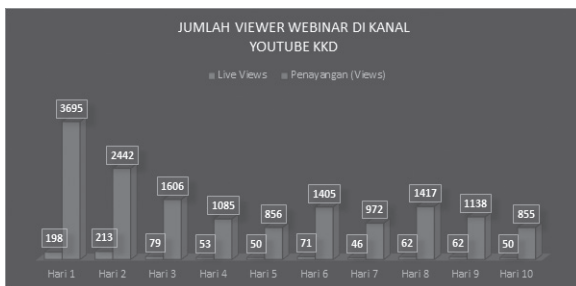


Tabel 1 Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom



Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:

Tabel 2 Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube

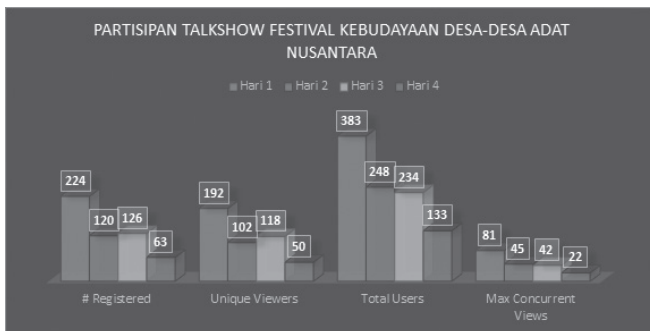


Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara.com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.



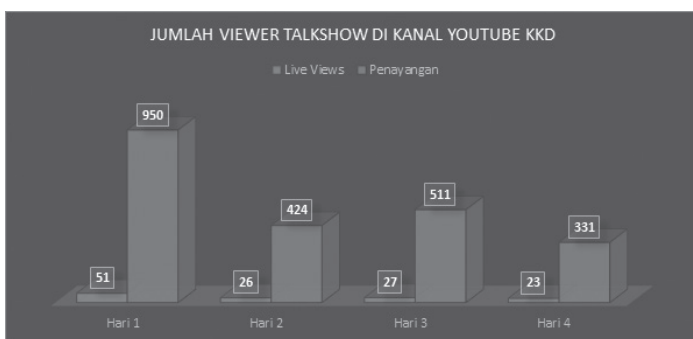
Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.

Tabel 3 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom



Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.

Tabel 4 Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube



Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia



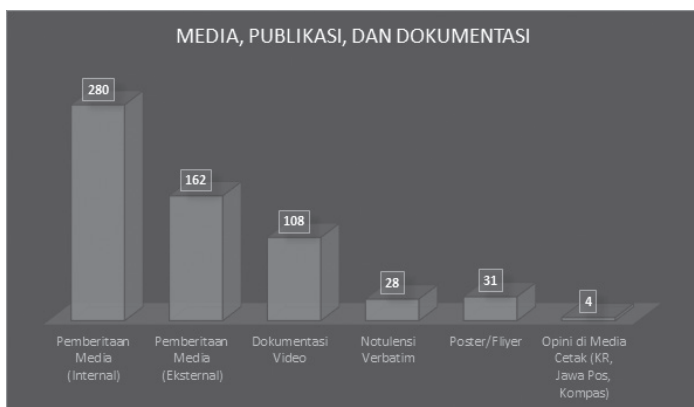
mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.

Keenam, buku putih Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman www.kongreskebudayaandesas.id; 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarai semua agenda kongres.



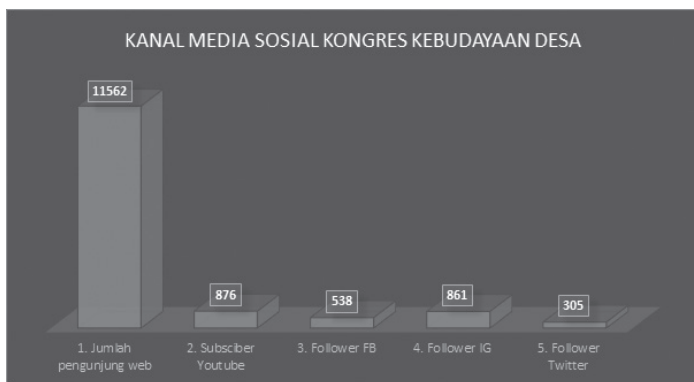
Tabel 5 Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD



Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

Tabel 6 Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung www.kongreskebudayaandesas.id sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861, dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungksi agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

Mengintip Hasil Kongres

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *probematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia



baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian desa. Jika 75 ribu desa bergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan

kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun*.

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah Desa Panggungharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus *ngesubi* dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong, matur nuwun, hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumanga'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan!

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta





Deklarasi

ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

Mengingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai

melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.



Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.

Desa Panggunharjo

Yogyakarta 15 Agustus 2020



KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

Ketua: Ryan Sugiarto

A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

4. Nava Anggita Ardiana

5. Yesseta Novi Sukma

Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoiril Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



B. Program: Aditya Mahendra Putra

Tim Webinar

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

Tim Festival

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikencono
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Ageng Indra Sumarah
3. Agus Teriyana
4. Ahmad Yasin
5. Amanatia Junda Solikhah
6. Asy Syaffa Nada Amatullah
7. Berryl Ilham
8. Chusna Rizqati
9. Citra Maudy Mahanani
10. Rheisnayucyntara
11. Dadang Ari Murtono
12. Diah Rizki Fitriani
13. Dwi Cipta
14. Dyah Permatasari
15. Fawaz
16. Fitriana Hadi
17. Fiqih Rahmawati
18. Gregorius Ragil Wibawanto
19. Irfan Afifi
20. Iswan Heriadjie
21. Ketjilbergerak
22. Kusharditya Albihafifzal
23. Prima Hidayah
24. Rio Anggoro Pangestu
25. Rofi Ali Majid
26. Suhairi Ahmad
27. Yona Primadesi

Tim Buku dan Call Of Papers



JARINGAN KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020





SIKA



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



diimplementasikan oleh:
giz
GIZ - German Development Cooperation



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN

